ENEWSLETTER
PKSPARLEMEN
KREATIF, ATRAKTIF
Edisi Februari III Tahun 2021 No. 7

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Almuzammil Yusuf, M.Si.

Jika Serius Pemerintah Sebaiknya Ajukan Usulan Perubahan RUU ITE

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mengembalikan UU ITE pada 'khittah'

UU ITE sebetulnya memiliki tujuan yang mulia yakni memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya. selaras dengan itu menjaga ruang digital bersih dan beretika namun dalam implementasinya malah lebih kental dengan nuansa hukum pencemaran nama baiknya daripada soal transaksi ekonomi-bisnisnya

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengalami kontraksi sangat luar biasa, aturan yang pada awalnya digagas untuk memberikan keamanan masyarakat dari kejahatan transaksi elektronik. Namun dalam perjalanannya seperti kehilangan arah dan tujuan awal, karena lebih banyak digunakan untuk menjerat kebebasan berpendapat (freedom of speech) dan berekspresi (freedom of expression).

Sebagaimana kita sadari bahwa demokrasi Indonesia saat ini bukan hanya terjadi pada ruang prosedural dan administratif seperti pemilu. Namun sejatinya lebih banyak bergumul dan bermuara pada diskusi publik (discourse). Ironisnya public sphere yang sehat tidak pernah bisa terbentuk secara utuh karena ditumbuh-kembangkan para komprador pesan yang tugasnya merusak harmoni, melakukan agitasi, doxing, character assassination hingga delegitimasi. Nama-nama yang tidak pernah ada dalam jurnal internasional, buku teks, seminar adiluhung atau mimbar akademik mendadak menjadi rujukan banyak orang. Dibicarakan publik, pemangku kepentingan, dan pengambil kebijakan. Para komprador pesan yang 'berdebu dan ampas kopi' menjadi panglima mengelabui para cerdik cendikia. Sosok dan akun yang tidak jelas asal usulnya yang akhirnya menjadi coreng muka satu negara.

Berulangkali otoritas menyampaikan bahwa para komprador pesan bukan bagian dari mereka, namun untuk kesekian kali nampak bergandengan tangan dalam pose dan rupa. Percayalah "sebuah gambar bernilai seribu kata" (Picture is worth a thousand words), berulang kali menyangkal sungguh tidak bisa mengabaikan jejak digital.

Public sphere yang dikehendaki Habermas tidak pernah bisa terwujud. Sebuah areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Areal ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata ataupun dunia maya.

Dalam naskah akademik UU ITE sesungguhnya lebih banyak menitikberatkan kepada transaksi elektronik, bukan pada cara orang berekspresi dan berbicara. Apalagi sekedar kritik, saran dan masukan yang berbeda untuk para penyelenggara negara.

UU ITE mendorong regulasi untuk mengatasi pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, cracking, phising, booting, viruses, cybersquating, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan Information and Communication Techonology (ICT). Bukan mencari-cari orang yang dianggap radikal, tanpa ukuran dan indikator yang tidak masuk akal.

Kita sadar bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh hak orang lain, sebagaimana dalam hal yang sama memikul kewajiban yang serupa. equality before the law meminta setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Namun akhir-akhir ini terasa 'mendidih' dan 'membeku' disaat yang bersamaan. hukum nampak memuai saat berhadapan dengan pendengung yang pro otoritas, namun mengkristal saat suara parau hadir dari seberang jalan.

UU ITE sebetulnya memiliki tujuan yang mulia yakni memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya. selaras dengan itu menjaga ruang digital bersih dan beretika namun dalam implementasinya malah lebih kental dengan nuansa hukum pencemaran nama baiknya daripada soal transaksi ekonomi-bisnisnya. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang mengatur soal pencemaran nama baik telah menjadi pasal karet dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi masyarakat sehingga banyak orang yang dilaporkan, ditangkap, dan ditahan karena menyampaikan pendapat di internet.

Kabar baik datang dari Pemerintah yang hendak merevisi UU ITE. Sebuah inisiatif dari eksekutif yang sangat memungkinkan dilakukan oleh konsititusi. Namun lagi-lagi kita akan menunggu konsistensi antara pesan dan kenyataan. ini ujian kita, aku dan kamu.

KOLASE KUTIPAN

Revisi UU ITE, Jangan Hanya Wacana

Sejumlah tokoh seperti Presiden Jokowi dan Mahfud MD bicara akan merevisi UU ITE karena dirasa tidak memberikan rasa keadilan akibat adanya pasal karet di dalamnya. PKS menganggap jika pemerintah memang serius, sebaiknya segera usulkan perubahan RUU ITE. sehingga tidak hanya sebatas maneuver pengalihan isu.

Almuzzammil Yusuf:
Jangan hanya wacana, segera usulkan Perubahan

RUU Omnibuslaw yang paling berat saja bisa dirumuskan dan diusulkan oleh Pemerintah dengan cepat, apalagi UU ITE yang hanya pasal saja. Usulan perubahan ini jika terjadi bagus di mata publik. Menunjukkan bahwa Pemerintah memang serius dengan ucapannya untuk membuka ruang dialog publik yang cerdas, lugas kritis konstruktif tanpa 'ancaman' kriminalisasi oleh para Buzzer pro pemerintah yang anti kritik

Hidayat Nurwahid:
Bisa lebih cepat jika pemerintah serius

“Dengan peta politik di DPR seperti itu, seharusnya revisi UU ITE mudah dilakukan dan cepat bisa diputuskan, apabila pihak Presiden Jokowi (Pemerintah) benar-benar serius inginkan revisi UU ITE, dan tidak sedang bermanuver politik, yang membenarkan kecurigaan bahwa kegaduhan ini semua hanyalah manuver untuk pengalihan issu, yang bisa makin membuat Rakyat tidak percaya dengan pernyataan dan janji Pemerintah”

Sukamta:
Tinjau ulang pasal pencemaran nama Baik

Dari sisi masyarakat hal ini tentu bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat. Meskipun dari sisi pemerintah sudah agak terlambat, karena apabila revisi nanti selesai diba-has antara pemerintah dengan DPR yang biasanya memakan waktu 1 hingga 2 tahun pembahasan, kemungkinan UU ITE yang sudah direvisi baru bisa diterapkan pada tahun 2023 atau 2024 di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi jangan sampai revisi UU ITE ini nantinya hanya move politik kosong belaka

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kalau Pemerintah Serius, Maka Usulan Perubahan RUU ITE Lebih Bagus Berasal dari Pemerintah

KUTIPAN

Jakarta (16/02) --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menanggapi permintaan Presiden yang meminta DPR merevisi pasal-pasal karet dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Almuzzammil, apa yang diusulkan Presiden, terkait dengan revisi UU ITE sangat baik.

"Kalau Pemerintah serius maka bagus usulan perubahan RUU ITE berasal dari Pemerintah. Tim Pemerintah pun sangat kuat. Profesor & Doktor banyak di Pemerintah," ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Almuzzammil Yusuf menambahkan bahwa RUU Omnibuslaw yang paling berat saja bisa dirumuskan dan diusulkan oleh Pemerintah dengan cepat, apalagi UU ITE yang hanya pasal saja.

"Usulan perubahan ini jika terjadi bagus di mata publik. Menunjukkan bahwa Pemerintah memang serius dengan ucapannya untuk membuka ruang dialog publik yang cerdas, lugas kritis konstruktif tanpa 'ancaman' kriminalisasi oleh para Buzzer pro pemerintah yang anti kritik," terang Anggota DPR asal Dapil Lampung I ini.

Pihak Kepolisian dan Kejaksaan, lanjut Muzzammil, pun akan sangat bisa membantu perumusan RUU ITE perubahan dan usulan Pemerintah tersebut karena mereka sangat tahu dimana masalah pasal karetnya selama ini yang mengancam reformasi & demokrasi," papar Muzzammil.

Pasal-pasal yang baik, kata Muzzammil, untuk menjaga kohesi nasional seperti larangan pelecehan SARA (Suku Ras dan Agama) tetap Kita pertahankan, karena bukan tempat untuk diperdebatkan.

"Itu wilayah yang harus saling menghormati demi pengokohan sila Ketuhanan YME dan sila persatuan Indonesia," tegas Muzzammil Yusuf mengakhiri.

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.
Anggota Badan Legislasi DPR RI

“Usulan perubahan ini jika terjadi bagus di mata publik. Menunjukkan bahwa Pemerintah memang serius dengan ucapannya untuk membuka ruang dialog publik yang cerdas, lugas kritis konstruktif tanpa 'ancaman' kriminalisasi oleh para Buzzer pro pemerintah yang anti kritik,"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Soal Revisi UU ITE, HNW: Jangan hanya Wacana, Pemerintah Segera Usulkan Inisiatif Perubahan

KUTIPAN

Jakarta (16/02) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mendukung rencana revisi UU ITE karena adanya sejumlah pasal yang dijadikan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE),

yang dirasakan oleh publik sebagai penyebab terjadinya ketidakadilan hukum, dan mengingatkan agar pemerintah serius merealisasikan wacana yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

"Hal ini perlu diakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi Rakyat tetap terjamin, terutama untuk melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh pemerintah, karena hak-hak itu semuanya juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," ungkap Hidayat.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diubah sebagian dengan UU No. 19 Tahun 2016 awalnya dibuat dengan niat dan tujuan yang sangat baik, sesuai dengan namanya terutama dalam mengatur transaksi elektronik dan kepastian hukum cyber.

Namun sayang, imbuh HNW, dalam implementasinya beberapa tahun belakangan ini, sejumlah pasal menjadi aturan yang dikaretkan dan disalahartikan oleh oknum-oknum aparat, sehingga bisa dipakai untuk menjerat hanya mereka yang kritis, mengkritik pemerintah, atau pihak-pihak di luar Pemerintah yang tak disukai oleh Pemerintah.

"Dalam tataran implementasi, justru sejumlah ketentuan dalam UU ITE dijadikan alat untuk mudah melaporkan pihak-pihak lain ke Polisi, atau mengkriminalisasi para Ulama atau aktivis yang bukan dari kubu pemerintah, atau yang dikenal kritis sekalipun dengan maksud memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (16/02).

HNW menuturkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo yang akan merevisi UU ITE ini, agar rakyat tidak takut mengeluarkan kritik, juga agar Rakyat terhindar dari ketidakadilan hukum, patut diapresiasi.

Tapi perlu dibuktikan dengan Presiden Jokowi mempercepat proses revisi ini, yang sesuai UUD bisa dimulai dari inisiatif pemerintah, pihak yang memang juga memiliki kewenangan legislasi bersama DPR.

"Yang perlu ditegaskan adalah kewenangan inisiasi legislasi, termasuk merevisi UU, itu bisa dilakukan oleh DPR atau juga oleh Pemerintah," ujarnya.

Jadi, lanjut HNW, kalau Presiden Jokowi serius, mestinya Presiden tidak melempar bola ke DPR untuk merevisinya, tetapi seharusnya Presiden mempergunakan kewenangan konstitusionalnya dengan segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mengajukan inisiatif Pemerintah mengusulkan revisi UU ITE itu.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Saya secara pribadi dan banyak pihak juga sudah berulangkali mengusulkan agar pasal karet dalam UU ITE ini segera direvisi, karena implementasi di lapangannya seringkali hadirkan hukum yang tidak adil, dan mengancam kebebasan rakyat untuk merdeka menyampaikan pendapat"

UU ITE Akan Direvisi, Legislator PKS: Setuju!

KUTIPAN

Jakarta (16/02) --- Sejumlah tokoh seperti Presiden Jokowi dan Mahfud MD bicara akan merevisi UU ITE karena dirasa tidak memberikan rasa keadilan akibat adanya pasal karet di dalamnya.

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, Selasa (16/2) melalui telepon seluler menyatakan setuju dan sesuai dengan pandangan Fraksi PKS.

"Rencana ini sejalan dengan pandangan kami yang beberapa tahun terakhir mengusulkan revisi UU ITE dalam RUU Prolegnas, meskipun kandas akibat kurangnya dukungan di parlemen. Karenanya, kami menyambut baik dan sangat setuju atas rencana revisi UU ITE. Dari sisi masyarakat hal ini tentu bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat. Meskipun dari sisi pemerintah sudah agak terlambat, karena apabila revisi nanti selesai dibahas antara pemerintah dengan DPR yang biasanya memakan waktu 1 hingga 2 tahun pembahasan, kemungkinan UU ITE yang sudah direvisi baru bisa diterapkan pada tahun 2023 atau 2024 di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi jangan sampai revisi UU ITE ini nantinya hanya move politik kosong belaka," papar Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa sebetulnya undang-undang ini sangat mulia pada awal pembahasannya dulu, untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya (elektronik).

"Waktu undang-undang ini disahkan menjadi UU RI No. 11 tahun 2008 itu juga sebetulnya sudah dinilai terlambat, karena awal tahun 2000an dunia internet sudah booming, tanpa ada aturan hukum yang secara pasti mengatur," tegasnya.

Berjalan seiringnya waktu, imbuhnya, ternyata UU ITE ini dalam implementasinya malah lebih kental nuansa hukum pencemaran nama baiknya daripada soal transkasi ekonomi-bisnisnya.

"Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dianggap pasal karet dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi masyarakat, hingga banyak korban berjatuhan. Banyak orang dilaporkan, ditangkap dan ditahan karena menyampaikan pendapatnya di internet," urai Sukamta.

Oleh karena itu, lanjut Doktor lulusan Manchester ini, UU ITE direvisi menjadi UU RI No. 19 tahun 2016. Saat itu beberapa hal direvisi seperti soal pemblokiran situs internet, right to be forgotten, penyadapan, penyidikan, dan termasuk pasal pencemaran nama baik yang dikurangi maksimal ancaman pidana penjaranya dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

"Kami Fraksi PKS saat itu meminta agar pasal pencemaran nama baik ditinjau ulang, bahkan kalau perlu dihapus saja, mengingat sudah diatur dalam KUHP, agar tidak ada duplikasi pengaturan. Hanya fraksi PKS dan PAN yang dianggap progresif pandangannya terhadap pasal tersebut," pungkasnya.

Namun, Sukamta yang juga bertindak sebagai anggota Panja Revisi UU ITE saat itu, menjelaskan bahwa dalam dinamika pembahasan, mayoritas fraksi (terkhusus fraksi-fraksi pendukung koalisi pemerintah) menginginkan pasal tersebut tetap dipertahankan dengan pengurangan maksimal ancaman pidana penjara agar tidak ada lagi kriminalisasi dengan penahanan sebelum putusan hukum tetap dari pengadilan. Dan akhirnya disahkan revisi UU ITE seperti yang sekarang. Selengkapnya di fraksi.pks.id

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

> “Kami Fraksi PKS saat itu meminta agar pasal pencemaran nama baik ditinjau ulang, bahkan kalau perlu dihapus saja, mengingat sudah diatur dalam KUHP, agar tidak ada duplikasi pengaturan. Hanya fraksi PKS dan PAN yang dianggap progresif pandangannya terhadap pasal tersebut.”

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Wakil Ketua FPKS: PKS Dukung Kepemimpinan Politik Perempuan

KUTIPAN

Banda Aceh (18/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai keberadaan dua kader perempuan yang menjadi Ketua DPD PKS Lhokseumawe dan Ketua DPD PKS Aceh Timur sebagai bukti pengakuan kepemimpinan perempuan di bidang politik, bukan karena kondisi darurat.

Hal ini disampaikannya dalam keterangan media usai bertemu struktur DPW PKS Aceh, Selasa, (16/02/2021).

"Ini bukti pengakuan kemampuan perempuan sebagai pemimpin politik. Jangan diartikan sebagai kondisi darurat karena ketiadaan kader laki-laki. Kalau alasannya kondisi darurat, lalu perempuan diberi beban kepemimpinan, apakah saat kondisi normal, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin? Saya tidak melihatnya demikian," katanya.

Menurut Netty, PKS akan memberi ruang yang memadai bagi kader perempuan untuk duduk di pengambilan keputusan partai, baik di tingkat daerah maupun pusat dengan tetap memerhatikan merit sistem dan jenjang kaderisasi.

"Sejak dulu PKS membangun sistem kaderisasi berjenjang, adil dan standar. Setiap kader perempuan dapat mencapai setiap jenjang dan memiliki kesempatan duduk di pengambilan keputusan jika memenuhi standar kaderisasi," katanya.

alam kesempatan tersebut Netty meminta partai memastikan adanya sistem dukungan bagi kader perempuan untuk berkontribusi optimal di masyarakat.

"Kader perempuan PKS sudah teruji militansi dan loyalitasnya pada partai. Hampir di setiap lini, kader perempuan hadir menyapa dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, partai harus memastikan adanya sistem dukungan untuk mereka agar peran kontribusinya semakin meningkat," katanya.

PKS, kata Netty, akan mengalokasikan penggunaan dana banpol untuk program pendidikan politik dan kaderisasi perempuan sehingga lahir kader perempuan yang siap menjadi pemimpin politik, baik di internal partai maupun di publik.

Politisi PKS yang bertugas di Komisi IX DPR RI ini meyakini keberadaan perempuan bukan sekadar menggenapkan, namun baik dalam perannya di rumah maupun di publik, ia dapat menjadi center of life yang menentukan warna ruang kehidupan.

"PKS berharap keberadaan kader perempuan di tengah masyarakat akan memastikan ceruk suara perempuan mengalir ke PKS pada Pemilu 2024," ungkap istri Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat ini.

Dalam kunjungan tersebut Netty meminta kader PKS agar terus membangun soliditas internal dan bersemangat dalam melayani rakyat serta melakukan kerja advokasi.

"Kerja pelayanan dan advokasi adalah kerja nafas panjang yang membutuhkan soliditas internal dan sinergitas dengan banyak pihak. PKS tidak akan mampu melayani rakyat sendirian karena memang ini tugas pemerintah," ungkapnya.

Terakhir Netty juga ingin memastikan semua perjuangan yang dilakukan oleh para kader dapat diartikulasikan menjadi tradisi baik dan bisa diwariskan.

"Salah satunya yang saya sampaikan adalah kritik, catatan atau protes kita kepada pemerintah harus diformulasikan dalam ide dan gagasan, utamanya dalam bentuk tulisan. Karena Verba Volant Scripta Manent, ucapan atau kata-kata kita akan hilang namun tulisan akan tetap abadi," pesan Netty.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"PKS berharap keberadaan kader perempuan di tengah masyarakat akan memastikan ceruk suara perempuan mengalir ke PKS pada Pemilu 2024"

Resmikan Mimbar Demokrasi Kebangsaan

Habib Salim Ajak Elemen Bangsa Bersatu Perbaiki Demokrasi Indonesia

KUTIPAN

hasil riset didapatkan dari The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks persepsi korupsi Indonesia turun pada tahun 2020 yang bertumpu pada kacamata ekonomi dan pembangunan tanpa dilandasi oleh integritas hanya akan memicu menjamurnya korupsi.

Jakarta (12/02) -- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Salim Segaf Al-Jufri sangat serius memperhatikan kondisi demokrasi di Indonesia yang belakangan ini berada dalam persimpangan jalan. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Fraksi PKS DPR RI, Jumat, (12/02).

Menurut Habib Salim, kondisi demokrasi Indonesia saat ini perlu perhatian khusus dari segenap elemen bangsa. Untuk itu diperlukan upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaikinya.

"Kondisi demokrasi kita saat ini cukup memprihatinkan dan bisa dikatakan ada di persimpangan jalan. Oleh sebab itu diperlukan upaya saling bergandengan tangan antara seluruh elemen bangsa agar apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa bisa tercapai," terangnya.

Mantan Menteri Sosial ini juga memaparkan bahwa hasil riset didapatkan dari The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks persepsi korupsi Indonesia turun pada tahun 2020 yang bertumpu pada kacamata ekonomi dan pembangunan tanpa dilandasi oleh integritas hanya akan memicu menjamurnya korupsi.

"Kita prihatin dalam korupsi penanganan pandemi COVID-19 sangat memalukan karena dilakukan oleh pejabat negara khususnya korupsi bantuan sosial terdampak covid-19. Saya harap akan muncul anak-anak muda demi memberikan ide gagasan khas anak muda untuk perbaikan bangsa," tegas Habib Salim.

Habib Salim menambahkan Indonesia harus menjadi bangsa yang unggul, jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di Dunia.

"Generasi muda dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya harus muncul dan bangkit dalam memberikan kontribusinya bagi bangsa Indonesia agar bisa unggul dibandingkan dengan bangsa lain dan menyumbangkan pemikirannya bagi bangsa yang kita cintai," ujar Habib Salim.

Habib Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA
Ketua Majelis Syuro PKS

"Generasi muda dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya harus muncul dan bangkit dalam memberikan kontribusinya bagi bangsa Indonesia agar bisa unggul dibandingkan dengan bangsa lain dan menyumbangkan pemikirannya bagi bangsa yang kita cintai"

Mimbar Demokrasi Kebangsaan FPKS DPR RI

Demokrasi Indonesia Perlu Perbaikan Substantif

KUTIPAN

Jakarya (12/2) - Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro menuturkan bahwa Indonesia sedang mengalami penurunan kualitas demokrasi

Hal ini bisa dilihat dari lemahnya penegakan hukum, pembungkaman kritik, lemahnya pemberantasan korupsi, serta maraknya penyimpangan yang dilakukan para elit dan pemodal.

" Demokrasi dengan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur kini tersandera oleh kuatnya praktik politik oligarki, monopoli dan kongkalikong antara penguasa dan pengusaha demi memelihara kekuasaan politik dan ekonominya" ujar Siti Zuhro dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI yang diselenggarakan secara virtual pada hari Jumat (12/2)

Hal ini diperparah dengan kurangnya check and balance terhadap institusi yang berkuasa, khususnya pada pihak eksekutif. Pemilu yang selama ini dijalankan juga belum menghasilkan pemimpin yang berjiwa negarawan. Bahkan nilai-nilai yang disepakati seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, kini mengalami politisasi.

Sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut, Siti Zuhro menyarankan segenap bangsa untuk melakukan perbaikan substantif. Pertama, pembangunan Indonesia harus didasarkan atas kemajemukan sebagai kekuatan.

Indonesia harus menghormati kemajemukan, sebab Indonesia adalah negara yang beragam penduduk dan budayanya. Kemajemukan adalah kekuatan sosial, bukan ancaman" ujar Siti Zuhro.

Kedua, pembangunan demokrasi harus diarahkan untuk menghasilkan demokrasi substantif yang menyejahterakan seluruh rakyat. Demokrasi substantif ini didasarkan tidak hanya demokrasi politik tetapi demokrasi ekonomi yang menekankan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. "Ini sesuai dengan sila ke 5 Pancasila, dimana rakyat memperoleh kesejahteraan sosial dari demokrasi. Bukan hanya segelintir orang seperti oligarki" ujar Siti Zuhro.

Ketiga, penegakan supremasi hukum (nomokrasi) merupakan harga tak tak boleh ditawar-tawar lagi. Maraknya korupsi, politik uang, kekerasan, pelanggaran dan kesewenang-wenangan hukum serta peredaran narkoba merupakan akibat dari tiadanya supremasi hukum.

"Jika gagal mengatasi ini, ketimpangan sosial-ekonomi, tumbuh kembangnya isu SARA/politisasi identita akan semakin menguat. Akan ada terjadinya pembelahan masyarakat, konflik dan kekerasan serta terorisme" ujar Siti Zuhro.

Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dan suku untuk sama-sama mengambil peran dalam menyamakan persepsi tentang bagaimana membangun bangsa dan negara yang adil dan beradab dalam masyarakat yang majemuk untuk persatuan Indonesia.

Di sisi lain, Siti Zuhro juga menekankan pentingnya partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat. Hal ini karena hanya parpol yang berwenang untuk mengajukan calon-calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat berdasarkan undang-undang.

"Untuk itu, jika kita ingin menilai kualitas demokrasi suatu bangsa, kita cukup menilai kualitas partai politiknya. Parpol dengan kaderisasi yang baik, massa yang kokoh, dan manajemen yang profesional akan menghasilkan pemimpin yang berjiwa negarawan dan mampu mengatasi persoalan bangsa" ujar Siti Zuhro.

Prof. Dr. R. SITI ZUHRO, MA
Pengamat Politik LIPI

> "Pembangunan demokrasi harus diarahkan untuk menghasilkan demokrasi substantif yang menyejahterakan seluruh rakyat, Demokrasi substantif ini didasarkan tidak hanya demokrasi politik tetapi demokrasi ekonomi yang menekankan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali

Ketua FPKS: Kita Ingin Perspektif Demokrasi Indonesia Jadi Jernih dan Cerdas

KUTIPAN

Jakarta (12/02) --- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan sambutan dan harapan terkait program Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digagas oleh Fraksi PKS DPR RI

sebagai sarana diskusi tema-tema kebangsaan. Jazuli berharap diskusi yang dilaksanakan pada Mimbar Demokrasi Kebangsaan akan menyajikan perspektif yang jernih dari para narasumber yang akan dihadirkan.

Jazuli juga menargetkan program Mimbar Demokrasi Kebangsaan akan berperan dalam mencerdaskan masyarakat sehingga demokrasi itu sendiri dapat dipahami secara benar.

"Indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, mungkin agak sedikit keruh demokrasi ini. Kita ingin perspektif demokrasi di Indonesia ini menjadi jernih dan cerdas. Mudah-mudahan acara ini bisa mencapai target ini, kita ingin demokrasi dipahami secara benar. Indonesia sebagai negara demokrasi memang berbeda dengan negara barat, karena demokrasi kita adalah demokrasi pancasila dan demokrasi yang berketuhanan," disampaikan Jazuli dalam Launching Mimbar Demokrasi Kebangsaan, Jumat (12/02).

Jazuli juga menyampaikan dukungan terhadap pengusulan dua tokoh yaitu Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri untuk dijadikan pahlawan Nasional sebagai bentuk penghargaan Fraksi PKS kepada para pejuang bangsa.

"Kami mendukung usulan yang mengusung dua tokoh bangsa menjadi pahlawan nasional, ini bentuk penghargaan Fraksi PKS kepada para pejuang bangsa, maka kami ikut mendukung usulan tersebut. Karena Fraksi PKS secara real dan konkrit juga pernah mengusulkan tokoh bangsa dan pendiri lainnya untuk menjadi pahlawan nasional, meskipun sebagian belum sukses. Semoga usaha Fraksi PKS ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar untuk rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia yang kita cintai ini," tutup Jazuli.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

"Indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, mungkin agak sedikit keruh demokrasi ini. Kita ingin perspektif demokrasi di Indonesia ini menjadi jernih dan cerdas. Mudah-mudahan acara ini bisa mencapai target ini, kita ingin demokrasi dipahami secara benar

Presiden PKS : Kami Sedih Indonesia Masuk Ke dalam Negara Cacat Demokrasi

KUTIPAN

Ahmad Syaikhu mempertanyakan bagaimana kasus - kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis seakan kebal hukum

Jakarta (12/02) --- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyampaikan pendapatnya mengenai indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan dan menjadi yang terendah selama 14 tahun terakhir berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit (EIU).

"Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi, dengan indeks demokrasi yang mengalami penurunan dengan skor 6,3. Menjadi skor terendah dalam 14 tahun terakhir." Tegas Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Launching Mimbar Demokrasi Kebangsaan FPKS DPR RI pada hari Jumat, (12/02) secara Virtual

Selain itu, Ahmad Syaikhu menyampaikan pendapat bahwa penegakan hukum pada saat ini seperti runcing kepada rakyat yang mengkritisi pemerintah.

Ahmad Syaikhu mempertanyakan bagaimana kasus - kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis seakan kebal hukum.

"Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia." ucap Ahmad Syaikhu.

Presiden PKS ini menyinggung juga mengenai partisipasi publik yang semakin tergerus dan tidak dilibatkan secara penuh dalam mengambil kebijakan.

"Berbagai demonstrasi yang massive seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal partisipasi publik sangat penting dibuthkan dalam rangka menciptakan good governance." tegas beliau.

Sebelumnya, Ahmad Syaikhu menyampaikan berdasarkan data pada Oktober 2020, kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam. Hal ini didukung oleh data bahwa adanya 158 pelanggaran dan serangan kepada kebebasan sipil yang mengkritisi Pemerintah.

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

"Partisipasi publik yang semakin tergerus dan tidak dilibatkan secara penuh dalam mengambil kebijakan. Berbagai demonstrasi yang massive seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal partisipasi publik sangat penting dibuthkan dalam rangka menciptakan good governance

Jusuf Kalla: Demokrasi di Indonesia Saat Ini Menuai Berbagai Kritik

KUTIPAN

Jakarta (12/2) --- Wakil Presiden RI ke 10 dan ke 12, Jusuf Kalla menyampaikan pendapatnya mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia yang cenderung menuai kritik dari berbagai kalangan.

Jusuf Kalla menuturkan secara kronologis bahwa dalam sejarah Indonesia, sistem pemerintahan tetap demokratis meskipun telah dilaksanakan melalui berbagai cara mulai dari negara kesatuan, Federal, hingga Parlementer.

"Dalam presidensial juga kita punya demokrasi yang bermacam-macam, dari jaman Bung Karno dengan demokrasi terpimpin, ada demokrasi formal yang dalam pelaksanaannya otoriter, demokrasi Pancasila pada masa pak Harto yang berakhir otoriner, sekarang setelah reformasi kembali lagi ke demokrasi. Walaupun, sekarang ini banyak keluhan lagi dengan berbagai kritikan tentang demokrasi yang berjalan." Ucap Jusuf Kalla dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang diselenggarakan secara virtual hari Jum'at (12/2).

Jusuf Kalla menyinggung pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam berbagai periode pemerintahan. Menurutnya, pelaksanaan demokrasi harus memiliki manfaat untuk rakyatnya.

"Contoh pada orde lama dan orde baru, demokrasi tidak berjalan dengan baik sehingga ekonomi menjadi sulit, dan lain-lain. Karena itu, kita harus tetap menjaga kepentingan masyarakat. Rakyat juga harus melihat pelaksanaan demokrasi yang baik agar hak-hak terjaga dan manfaatnya juga." Jelas Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, penegakkan HAM di Indonesia masih perlu menjadi perhatian.

"Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia karena demokrasi itu dari dan oleh rakyat, berarti rakyat mendapat hak dan manfaat dalam demokrasi. Karena itu kita harus menghargai hak-hak asasi sebagai prinsip pokok. Kalau ada yang melanggar HAM, maka itu adalah suatu pelanggaran terhadap konstitusi." Ucap Ketua PMI itu.

Jusuf Kalla menyinggung indeks demokrasi yang menurun berhubungan dengan banyaknya masalah hukum di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik.

"Mungkin di sinilah letaknya bahwa dalam 14 tahun terakhir, indeks demokrasi kita menurun ke 64 dari 123 negara di survey. Melihat banyak masalah hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Dan juga dalam negara demokrasi, konstitusi adalah dasar daripada cara kita melaksanakan pemerintahan." Jelas Jusuf Kalla.

Drs. H.M. JUSUF KALLA
Wapres RI ke 10 & 12

"Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia karena demokrasi itu dari dan oleh rakyat, berarti rakyat mendapat hak dan manfaat dalam demokrasi. Karena itu kita harus menghargai hak-hak asasi sebagai prinsip pokok. Kalau ada yang melanggar HAM, maka itu adalah suatu pelanggaran terhadap konstitusi"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tanggapi Pernyataan JK, Habib Aboe: Poin Penting bagi Perjalanan Bangsa Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (13/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga merupakan Sekjen DPP PKS, Aboebakar Al-Habsy, menanggapi launching Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar, Jumat, (12/02/2021).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, PKS memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga demokrasi di Indonesia.

"Karenanya dalam rangka mengokohkan demokrasi di Indonesia Fraksi PKS DPR RI menginisiasi Program Mimbar Demokrasi & Kebangsaan", terangnya.

Mimbar demokrasi, kata Anggota Komisi III DPR RI ini, merupakan forum yang dirancang Fraksi PKS DPR untuk membahas masalah-masalah fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan publik.

"Apa yang disampaikan Pak JK kemarin, merupakan point penting yang menjadi pelajaran bangsa ini. Pertama, bahwa Demokrasi memakan tuannya sendiri contohnya Amerika Serikat. AS perangi Libia, Irak tidak demokratis namun hasil negatifnya negara hancur, ribuan nyawa melayang," papar Habib Aboe.

Dokumen yang dikeluarkan oleh AS, lanjutnya, menyatakan bahwa Presiden Indonesia, Soekarno ditumbangkan.

"CIA mengakui sebagai dalangnya. Alasan Soekarno dilengserkan akibat condong ke komunis Rusia ketika perang dingin," imbuhnya.

Kedua, kata Habib Aboe, beliau menyampaikan Demokrasi turun maka korupsi naik akibat biaya politik demokrasi di Indonesia mahal.

"Bagi PKS mimbar demokrasi adalah upaya untuk memberikan keseimbangan wacana dan pemikiran sehingga akan terjadi check and balance yang baik dengan pemerintah," tutup Habib Aboe.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

PKS memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Karenanya dalam rangka mengokohkan demokrasi di Indonesia Fraksi PKS DPR RI menginisiasi Program Mimbar Demokrasi & Kebangsaan. ini, merupakan forum yang dirancang Fraksi PKS DPR untuk membahas masalah-masalah fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan publik

PKS

Saudaraku,

olahraga itu tidak sulit,
hanya butuh komitment.

Mari kita rawat
kesehatan

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

PKS-Lemhanas Perkuat Kemitraan Dalam Menjaga dan Mengokohkan NKRI

KUTIPAN

Kunjungan ini menurut Jazuli bagian dari silaturahim kebangsaan dan kemiteraan PKS ke lembaga-lembaga negara untuk menunjukkan komitmen kebersamaan dan sinergitas dalam membangun bangsa dan negara. Dan, menurutnya, akan dilanjutkan ke lembaga-lembaga negara lainnya.

Jakarta (11/02) -- Elit Partai Keadilan Sekahtera (PKS) yang terdiri dari Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua Dewan Syariah Pusat Surahman Hidayat, dan Ketua DPP PKS Sukamta mengunjungi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan diterima langsung oleh Gubernur Lemhanas Letjen Purn Agus Wijoyo didampingi jajarannya pada Kamis (11/02).

"Kunjungan PKS ke Lemhanas ini dalam rangka silaturahim dan bertukar pikiran dengan Lemhanas bagaimana mengokohkan NKRI dan nasionalisme Indonesia dengan modalitas yang kita miliki," ungkap Jazuli.

Lemhanas, menurut Anggota Komisi I DPR ini, merupakan Lembaga yang strategis di republik ini dan memiliki pengalaman panjang dalam menghadirkan konsep dan doktrin ketahanan nasional serta dalam mendidik kader pemimpin berkarakter negarawan.

"PKS sebagai partai politik memiliki komitmen kuat untuk mengokohkan karakter kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kami berdiskusi dengan Gubernur Lemhanas, di tengah tantangan kebangsaan dari internal dan eksternal, bagaimana bangsa kita semakin maju dan produktif namun tetap dengan nilai identitas yang kuat," terangnya.

Sebagai wujud konkrit atas komitmen kebangsaan PKS tersebut, DSP PKS akan meluncurkan Sekolah Etik Kebangsaan. Sementara Fraksi PKS meluncurkan 2 Forum yaitu Mimbar Demokrasi Kebangsaan dan Mimbar Pancasila dan Konstitusi dalam bentuk diskusi publik secara rutin. Serta meminta Lemhanas sebagai salah satu narasumbernya.

Kunjungan ini menurut Jazuli bagian dari silaturahim kebangsaan dan kemiteraan PKS ke lembaga-lembaga negara untuk menunjukkan komitmen kebersamaan dan sinergitas dalam membangun bangsa dan negara. Dan, menurutnya, akan dilanjutkan ke lembaga-lembaga negara lainnya.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"PKS sebagai partai politik memiliki komitmen kuat untuk mengokohkan karakter kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kami berdiskusi dengan Gubernur Lemhanas, di tengah tantangan kebangsaan dari internal dan eksternal, bagaimana bangsa kita semakin maju dan produktif namun tetap dengan nilai identitas yang kuat"

Ini Alasan Muzzammil Bertanya Apakah Buzzer Dibayar APBN ?

KUTIPAN

Jakarta (14/02) --- Pemerintah melalui juru bicara presiden, Fadjroel Rachman menegaskan bahwa pemerintah tidak punya buzzer. Menurutnya, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya.

Anggota Fraksi PKS DPR Almuzzamil Yusuf mengatakan memang sah-sah saja kalau ada buzzer yang membela kebijakan pemerintah.

Jika cara membela itu dengan diskusi yang baik, sebenarnya tidak ada masalah. Namun yang menjadi persoalan, menurut Almuzzammil adalah adanya buzzer yang melakukan intimidasi dan mem-bully orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.

"Tindakan buzzer ini bahkan sampai mencari-cari kesalahan pribadi dan mengungkapkan hal-hal pribadi orang yang kritis ke pemerintah, melalui media sosial," pungkasnya.

Kalau memang pemerintah tidak punya buzzer, pemerintah semestinya bisa mengungkap mereka.

"Karena buzzer ini, cara kerjanya sangat terstruktur-sistematis dan masif (TSM). Negara punya instrumen polisi dan inteligen yang punya kemampuan dan tekhnologi untuk mengungkap siapa mereka," ungkapnya.

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.
Anggota Komisi I DPR RI

“Jika cara membela itu dengan diskusi yang baik, sebenarnya tidak ada masalah. Namun yang menjadi persoalan, menurut Almuzzammil adalah adanya buzzer yang melakukan intimidasi dan mem-bully orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tindakan buzzer ini bahkan sampai mencari-cari kesalahan pribadi dan mengungkapkan hal-hal pribadi orang yang kritis ke pemerintah, melalui media sosial

Aleg PKS Ajak Semua Pihak Selamatkan Proses Transisi Demokrasi di Myanmar

KUTIPAN

Tasikmalaya (17/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mendukung pernyataan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Militer Myanmar yang menyatakan bahwa hak berkumpul para demonstran secara damai harus dihormati sepenuhnya dan tidak dikenakan pembalasan.

"Saya khawatir Myanmar menjadi negara ASEAN yang indeks demokrasinya semakin terpuruk jika pihak militer memilih melakukan kekerasan kepada para demonstran", ungkap Anggota Komisi I DPR RI dari PKS di sela-sela kunjungan kerjanya ke Markas Komandan Skadron-11/Serbu Pusat Penerbangan TNI-AD, semarang.

Menurutnya, Data di Economist Intelligence Unit memperlihatkan dua negara di kawasan Asia yang indeks demokrasinya pada tahun 2019 menurun tajam, yakni Hong Kong dan Myanmar.

Kualitas demokrasi Myanmar yang mandek, membuat situasi politik dan keamanan makin tidak kondusif, sementara proses rekonsiliasi, dialog, komunikasi, antar kelompok tidak berjalan baik.

"Oleh karenanya semua pihak harus menyelamatkan proses transisi Myanmar ke arah demokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu. Mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini", imbuh Toriq.

Hal senada dengan yang disampaikan Menlu RI, ia menekankan, bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama. Indonesia selalu konsisten menyampaikan kesediaannya untuk berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di Myanmar.

"Indonesia menganut prinsip politik yang bebas dan aktif. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa" kata Toriq.

Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal diam saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.

"Dengan politik bebas aktif, Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat," ungkap Toriq mengakhiri.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi I DPR RI

"Kualitas demokrasi Myanmar yang mandek, membuat situasi politik dan keamanan makin tidak kondusif, sementara proses rekonsiliasi, dialog, komunikasi, antar kelompok tidak berjalan baik. Oleh karenanya semua pihak harus menyelamatkan proses transisi Myanmar ke arah demokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu. Mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pelaporan Din Syamsuddin, Aleg PKS: Cermin Rusaknya Moral, karena Kedepankan Permusuhan

KUTIPAN

Jakarta (15/02) --- Sejumlah pihak melaporkan Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta melihat persoalan ini bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elit dan tokoh yang ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog.

"Sedikit-sedikit sekarang melaporkan dengan tuduhan intoleran dan radikal, ini sesungguhnya mereka yang melaporkan ini menunjuk muka mereka sendiri sebagai orang intoleran dan suka menebar kebencian. Ini sangat memprihatinkan karena sikap elit dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat. Akibatnya semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi. Sangat berbahaya kondisi seperti ini bagi masa depan Indonesia. Mestinya saat ini elit dan tokoh berikan contoh dengan kedepankan dialog, bukan permusuhan." papar Sukamta.

Lebih lanjut Sukamta menyebutkan apabila sejumlah pihak yang melaporkan Pak Din Syamsudin ini dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka ini salah besar dan akan jadi blunder atas pernyataan Presiden Jokowi yang minta masyarakat untuk kritis.

"Pak Din itu selama ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dialog dan mendorong moderasi. Tuduhan radikal ini kan asal banget, sangat mungkin ada pesanan terkait kejadian ini. Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal. Saya kira ini bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd," tegasnya.

Di sisi lain Anggota Komisi 1 DPR RI ini menilai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah akan rawan disalahgunakan oleh elit dan tokoh yang punya watak permusuhan. Mengingat di dalam Perpres tersebut disebutkan adanya pelatihan pemolisian masyarakat.

"Ini yang sejak awal saya kritisi, jangan sampai masyarakat didorong untuk merespon peristiwa dengan sedikit-sedikit memunculkan prasangka negatif, apalagi definisi ekstemisme atau radikalisme bisa subjektif. Sementara orang yang mendapat tuduhan seperti itu akan rusak nama baiknya karena terlanjur tersebar luas pemberitaannya melalui media massa dan media sosial. Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi," terang Sukamta.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

> “Ini sangat memprihatinkan karena sikap elit dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat. Akibatnya semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi.

Desak Revisi UU Pemilu, Politisi PKS: Revisi Diperlukan karena Demokrasi Dipertaruhkan

KUTIPAN

Jakarta (16/02) --- Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan desakan yang disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya revisi UU Pemilu untuk menjaga kualitas pemilu melalui akun media sosialnya.

"Revisi perlu didasarkan pada kepentingan publik jangka panjang. Hal substansial paling utama. Demokrasi pun akan sehat karena masyarakat menikmati dan tidak terbebani dengan pemilu yang marathon. Harus diakui jika berkaca pada Pemilu 2019 kemarin, gelaran Pileg tenggelam oleh ingar-bingar Pilpres." Tegas Mardani melalui cuitannya di akun media sosial pribadinya.

Menurut aleg PKS ini, jika memaksakan pemilu serentak di 2024, akan berdampak kepada kesulitas masyarakat untuk memilah isu nasional mengenai eksekutif dan legislatif

Selain itu, Mardani juga berpendapat bahwa pemilu serentak akan menyulitkan partai politik dalam proses pencalonan, hal ini disebabkan oleh Pileh dan Pilkada yang berdekatan.

"Partai politik yang baik yang banyak berinteraksi dan terhubung dengan publik, Jika 5 tahun hanya sekali, maka tahun - tahun berikutnya aka nada jarak dan ini membuat oligarki parpol kian kuat." Ucap aleg PKS tersebut.

Mardani menegaskan bahwa KPU juga menyatakan keberatan untuk melaksanakan Pemilu serentak di 2024.

"KPU juga memerlukan payung hukum setingkat UU untuk pengaturan teknis penyelenggaraan & aplikasi teknologi elektronik, yang semua itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan peraturan KPU." Jelas Mardani.

Hal lain yang jelas harus diperhatikan, menurut Mardani adalah mengenai akan adanya potensi munculnya 24 PLT Gubernur karena kosongnya jabatan di 2022. Hal ini harus dihindari karena pemimpin bukan berasal dari kehendak rakyat dan tidak memiliki kapasistas yang teruji di lapangan.

Aleg PKS Komisi II DPR ini menegaskan bahwa Revisi UU Pemilu mempunyai peran besar terhadap perkembangan demokrasi, untuk itu Mardani menyampaikan bahwa PKS akan tetap melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

"Revisi perlu didasarkan pada kepentingan publik jangka panjang. Hal substansial paling utama. Demokrasi pun akan sehat karena masyarakat menikmati dan tidak terbebani dengan pemilu yang marathon. Harus diakui jika berkaca pada Pemilu 2019 kemarin, gelaran Pileg tenggelam oleh ingar-bingar Pilpres

Terkait Pelaporan Din Syamsuddin

Anggota FPKS: KASN Harus Bekerja Objektif dan Transparan

KUTIPAN

Jakarta (17/02) --- Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, mengingatkan KASN agar berhati-hati menindaklanjuti laporan GAR ITB terhadap beberapa orang khususnya laporan terhadap mantan ketua umum Muhamadiyah Din Syamsudin.

Menurut Surahman Hidayat, KASN harus bekerja secara objektif, cepat, dan transparan, sesuai dengan ketentuan merit sistem yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014. Segera lakukan tindak lanjut sehingga hal ini tidak menjadi isu liar yang bisa berujung pada bibit perpecahan ujar Surahman.

"Pak Din Syamsudin ini tokoh nasional yang memiliki basis massa yang cukup besar, apabila dinilai ada tindakan sewenang-wenang terhadap beliau, sedikit banyak akan menimbulkan polemik di masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut Surahman Hidayat berpendapat bahwa dalam pekan ini seharusnya KASN sudah dapat memberikan kesimpulan atas laporan tersebut, karena tidak sulit untuk melihat track record pak Din Syamsudin selama ini.

Sejauh yang saya kenal tidak ada satu pemikiran dan tindakan pak Din yang mengarah pada kategori radikal. Belakangan ini memang kita ketahui beliau dan tokoh-tokoh yang lain aktif mengkritisi kebijakan pemerintah melalui wadah KAMI. Tapi ini jauh dari kata radikal, karena kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, Presiden sendiri meminta agar masyarakat aktif mengkritik kebijakan pemerintah sebagai bagian dari check and balance," ujar Surahman.

Surahman Hidayat mengingatkan bahwa saat ini Indonesia sedang membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat karena sedang berada pada posisi sulit ditengah dampak Covid 19.

"KASN tidak boleh memperkeruh keadaan, setiap laporan masyarakat sepatutnya memang diterima dan ditindak lanjuti, namun laporan yang tidak memiliki basis data yang jelas dan cenderung bersifat fitnah, KASN perlu segera mengesampingkannya setelah diterima. Saat ini kita butuh persatuan dan kesatuan bangsa serta kebijakan pemerintah yang tepat untuk keluar dari situasi pandemi covid 19," pungkas Surahman.

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat X

> “KASN tidak boleh memperkeruh keadaan, setiap laporan masyarakat sepatutnya memang diterima dan ditindak lanjuti, namun laporan yang tidak memiliki basis data yang jelas dan cenderung bersifat fitnah, KASN perlu segera mengesampingkannya setelah diterima. Saat ini kita butuh persatuan dan kesatuan bangsa serta kebijakan pemerintah yang tepat untuk keluar dari situasi pandemi covid 19”

#MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN
FRAKSI PKS DPR RI

PKS

Menurut The Economist, skor Index Democracy Indonesia mencapai 6,30 (dari 10,0) pada tahun 2020, turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 6,48.

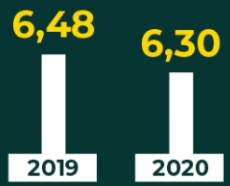

Ini adalah skor terburuk dalam kurun 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai *flawed democracy*/demokrasi yang lemah.

Peringkat dari 167 Negara :

39

44

55

64

| **Sumber** : The Economist Intelligence Unit, 2020
| **Grafis** : Aditya Angga

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TURUN

Desain : Aditya Angga

fraksi.pks.id | Fraksi PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | PKS TV DPR RI

Kunker ke Mitra Kerja, Habib Aboe Soroti Maraknya Peredaran Narkoba dari Dalam Lapas

KUTIPAN

Jakarta (18/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy, bersama Anggota Komisi III lainnya mengunjungi sejumlah mitra kerja di wilayah DKI Jakarta, Kamis, (18/02).

"Hari ini Komisi III melakukan Kunker ke mitra kerja yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hari pertama ini Komisi III mendatangi Lapas Cipinang, Kanwil Kemenkumhan DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Habib Aboe menambahkan, agenda utama kunjungannya adalah monitoring dan evaluasi kinerja mitra kerja. Selain itu, imbuhnya, pihaknya juga memetakan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.

"Hal yang menjadi atensi utama saya adalah soal peredaran narkoba di lapas dan peredaran narkoba yang dikendalikan di Lapas. Misalkan saja di lapas cipinang, dalam beberapa waktu terakhir menjadi atensi masyarakat, karena adanya dugaan pengendalian peredaran Narkoba dari dalam lapas Cipinang," terangnya.

Misalkan saja, kata Habib Aboe, akhir tahun kemarin Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tangki bensin mobil.

"Dari empat orang yang ditangkap mereka menyebut nama HF yang berada di Lapas Cipinang sebagai pengendali barang tersebut," imbuh Sekjen DPP PKS ini.

Demikian pula, kata Habib Aboe, Ketika Dit Reserse Narkoba Polda Jabar menyatakan bahwa dalam sebulan terakhir di wilayah hukum Polres Cianjur terungkap 3 kasus peredaran sabu di lingkungan Lapas. Para tersangkanya masih dalam satu jaringan yang jika diurut juga merupakan jaringan Lapas Cipinang.

"Harus ada evaluasi yang mendasar tentang pengamanan di Lapas Cipinang, tentunya seorang napi seharusnya tidak bisa mengendalikan peredaran narkoba, karena seharusnya tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar," urainya.

Jika mereka masih bisa berkomunikasi dengan leluasa, imbuhnya, berarti ada yang salah dengan sistem keamanan lapas. Hal ini harus menjadi atensi dan evaluasi dari Kemenkumham.

"Saat dengan Kanwil kemenkumham DKI saya minta agar kakanwil memperhatikan hal ini dengan baik. Apalagi ada video viral pesta sabu yang diduga terjadi di lapas Salemba. Ini tentunya menjadi pertanyaan untuk Kadiv PAS dan Kakanwil, mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat melihat seolah lapas menjadi surga untuk peredaran narkoba," tegas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

> “Harus ada evaluasi yang mendasar tentang pengamanan di Lapas Cipinang, tentunya seorang napi seharusnya tidak bisa mengendalikan peredaran narkoba, karena seharusnya tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar.”

Bertemu Menteri Baru KKP, Politisi PKS Beri Masukan Program Kesejahteraan Nelayan

KUTIPAN

Jakarta (11/02) --- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin pada saat Rapat kerja antara DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memberi masukan tehnis program kerakyatan untuk masyarakat Nelayan.

Rapat kerja yang digelar pada 9 Februari 2021 ini adalah kali pertama pertemuan Andi Akmal dengan menteri Baru KKP, Wahyu Sakti Trenggono.

"Pak menteri, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berperiode-periode, tidak ada pernah membuat program secara masif untuk nelayan. Selama ini program KKP dengan nilai yang besar tapi secara jumlah sedikit. Nelayan di Indonesia ini banyak tersebar di seluruh Nusantara. Data per 23 Maret 2020 saja, nelayan kita berjumlah 1.459.874 orang", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengusulkan, agar bantuan untuk nelayan itu jangan yang terlalu besar tapi jumlahnya banyak. Akmal membandingkan dengan bantuan kapal 10 hingga 200 grosston atau stasiun pengolahan rumput laut yang jumlahnya sedikit.

Untuk menerima bantuan seperti ini, imbuhnya, tidak sembarangan orang karena memerlukan spesifikasi tertentu dan akhirnya penerima adalah pengusaha atau pedagang, bukan nelayan kecil.

"Nelayan-nelayan pesisir kita ini banyak pak menteri, dan mereka kebanyakan pakai sampan saja dalam mencari ikan. Kalau nelayan di kasih sampan kan bisa ribuan nelayan yang dapat tiap propinsi. Begitu juga nelayan rumput laut, bila mereka di kasih jaring atau tali jaringnya, berapa puluh ribu nelayan tiap propinsi yang dapat bantuan ini. Sehingga kehadiran KKP atau pemerintah dalam hal ini, dapat dirasakan masyarakat nelayan", saran Akmal.

Politisi PKS ini berharap, bahwa anggaran KKP yang sudah kecil ini, dapat efektif dalam menjangkau rakyat kecil terutama nelayan di sekitar pesisir. Termasuk pemberdayaan para petambak garam, yang perlu melibatkan nelayan di seluruh rakyat Indonesia dengan pola serapan garam rakyat yang mampu berkualitas setara garam industri, tentu kita tidak akan lagi ada persoalan garam impor.

"Saya yakin, KKP dengan membuat program-program kerakyatan ini, akan dapat semakin kreatif untuk mengelola APBN dan dalam waktu bersamaan, rakyat kecil merasakan kehadiran pemerintah. Untuk KKP dalam program kerakyatan yang masif di masyarakat nelayan agar dapat studi banding kepada kementan maupun kementerian ESDM yang telah memberi minimal ribuan konverter kit (konkit) kepada nelayan tiap propinsi sentra nelayan", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

> “Nelayan-nelayan pesisir kita ini banyak pak menteri, dan mereka kebanyakan pakai sampan saja dalam mencari ikan. Kalau nelayan di kasih sampan kan bisa ribuan nelayan yang dapat tiap propinsi. Begitu juga nelayan rumput laut, bila mereka di kasih jaring atau tali jaringnya, berapa puluh ribu nelayan tiap propinsi yang dapat bantuan ini. Sehingga kehadiran KKP atau pemerintah dalam hal ini, dapat dirasakan masyarakat nelayan

Masa Reses, Johan Dorong KKP Hadir Bantu Peningkatan Budidaya Ikan Kerapu Nelayan

KUTIPAN

Denpasar (17/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, melakukan kunjungan kerja pada masa reses bersama sejumlah Anggota Komisi IV lainnya untuk meninjau pelaksanaan budidaya ikan kerapu di Kampung Serangan, Kota Denpasar Bali, Senin, (15/02/2021).

Johan melihat budidaya ikan kerapu ini selaras dengan program terobosan dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang ingin menggerakkan perikanan budidaya untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang didukung oleh Badan Riset perikanan kelautan untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya kita.

"Saya mendorong KKP untuk selalu memfasilitasi masyarakat nelayan atas inisiatif mereka karena melihat potensi sumberdaya laut yang mereka miliki untuk melakukan kegiatan budidaya kerapu persilangan ini," ujar Johan.

Politisi PKS ini berharap untuk mewujudkan terobosan itu, KKP segera menyiapkan strategic planning dengan menjadikan inisiatif baik dari masyarakat nelayan ini sebagai daya ungkitnya.

"Agar budidaya ikan kerapu terus berkembang dan akan berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya serta mampu memperbaiki nulai tukar nelayan untuk peningkatan kesejahteraan para pembudidaya ikan kerapu ini," tutur Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini melihat ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak diminati nelayan untuk dibudidayakan di berbagai perairan laut Indonesia.

"Dari kunjungan kerja di Kampung Serangan Bali ini, saya menghimbau KKP agar ke depan menyiapkan sistem agribisnis budidaya ikan kerapu sebagai upaya pengembangan produk unggulan daerah dan terus mendukung kegiatan masyarakat nelayan serta pemerintah harus hadir menjadi solusi permasalahan yang dihadapi berbagai kelompok pembudidaya ikan kerapu ini", tukas Johan.

Legislator dari NTB ini mendorong KKP agar selalu berupaya mengembangkan produksi usaha budidaya ikan kerapu, baik jumlah produksi, rumah tangga perikanan budidaya maupun luas lahan budidaya.

"Hal ini karena masyarakat nelayan semakin besar mampu membaca peluang usaha budidaya ikan kerapu yang tentunya pemerintah harus hadir membantu menyiapkan kepastian ketersediaan pasar dan sistem pemasaran ikan kerapu ini baik dalam negeri maupun untuk ekspor," papar Johan.

Johan menilai selama ini kebutuhan ikan kerapu hanya mengandalkan pasokan dari hasil tangkapan dan seringkali dilakukan dengan berbagai cara yang bisa berdampak merusak terumbu karang yang merupakan habitat alami ikan kerapu.

"Saatnya Pemerintah hadir memprioritaskan pengembangan teknologi budidaya ikan kerapu terutama pada aspek perbenihan dan pembesaran pada keramba untuk membantu masyarakat nelayan kita," tutup Johan.

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

"Agar budidaya ikan kerapu terus berkembang dan akan berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya serta mampu memperbaiki nulai tukar nelayan untuk peningkatan kesejahteraan para pembudidaya ikan kerapu ini"

Anggota FPKS Dorong Presiden Perkuat KNKT

KUTIPAN

Jakarta (13/02) --- Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan penguatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),

dari segi perundang-undangan, kelembagaan, anggaran, SDM investigator, serta sarana prasarana.

Diketahui pada Rabu, 10 Februari 2021, KNKT menyampaikan laporan pendahulu terkait jatuhnya pesawat Sriwajaya Air SJ 182 pada 9 Januari 2021. KNKT menyatakan bahwa sistem autothrottle pesawat tersebut telah mengalami dua kali kerusakan dan anomali. Namun menurut KNKT, kerusakan sistem autothrottle bukanlah komponen signifikan dan utama pesawat, sehingga saat terjadi kerusakan, pesawat masih diizinkan terbang maksimal 10 hari.

Menanggapi laporan tersebut, Suryadi mengapresiasi kinerja KNKT dan mendorong penyelidikan lebih lanjut terhadap anomali autothrottle tersebut.

"Saya harap KNKT segera dapat menemukan penyebab kecelakaan dan memberikan rekomendasi agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali," ujar Suryadi.

Selain itu, Suryadi juga menyoroti bahwa selama ini sebagian besar rekomendasi KNKT terhadap investigasi kecelakaan penerbangan banyak yang belum tuntas ditindaklanjuti. Hal ini tersirat dari penilaian ICAO tahun 2017 terhadap keselamatan penerbangan Indonesia dimana terdapat dua komponen Skor EI (Effective Implementation) Indonesia tersebut yang nilainya dibawah rata-rata global.

"Yang pertama yaitu skor CE1 nilainya sebesar 72,73 sementara nilai rata-rata global yaitu 75,75. Hal ini terkait dengan pembentukan UU penerbangan sipil yang mendukung sistem penerbangan sipil dan fungsi peraturan negara yang sesuai dengan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Konvensi Chicago). Yang kedua adalah skor CE8 yang nilainya sebesar 49,12 sedangkan nilai rata-rata global yaitu 51,81, yang terkait dengan pelaksanaan proses dan prosedur untuk menyelesaikan kekurangan yang diidentifikasi berdampak pada keselamatan penerbangan," ucap Suryadi.

Suryadi juga menyatakan bahwa hasil investigasi KNKT atas beberapa peristiwa kecelakaan di masa lalu, disebabkan oleh beberapa faktor yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan mekanisme pengawasan, baik dari internal Maskapai Penerbangan maupun tata kelola pengawasan dari pihak otoritas penerbangan, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub

"Tidak tuntasnya tindak lanjut hasil investigasi KNKT mungkin saja berkaitan dengan fakta bahwa KNKT secara administratif masih berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemenhub sehingga mungkin menyebabkan rekomendasi KNKT tidak memiliki kekuatan," tegasnya.

Suryadi menilai PP No 62 tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi juga masih lemah. Selain itu dari segi kelembagaan, KNKT bukanlah organisasi yang mandiri.

Walaupun menurut Perpres No. 2 Tahun 2012 tentang KNKT Pasal 3, KNKT merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun menurut Perpres yang sama Pasal 9, dalam melaksanakan tugasnya KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.

Oleh karena itu, Suryadi mendorong Presiden agar segera melakukan penguatan KNKT, baik dari segi perundang-undangan, kelembagaan, anggaran, SDM investigator, dan sarana prasarana

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T
Anggota Komisi V DPR RI

"Tidak tuntasnya tindak lanjut hasil investigasi KNKT mungkin saja berkaitan dengan fakta bahwa KNKT secara administratif masih berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemenhub sehingga mungkin menyebabkan rekomendasi KNKT tidak memiliki kekuatan"

Aleg PKS: Selamatkan Kondisi Jalan, Kemenhub Harus Serius Tindak Kendaraan Kelebihan Tonase

KUTIPAN

Pekanbaru (17/02) --- Perbaikan sektor infrastruktur Riau selalu jadi perhatian Anggota FPKS Syahrul Aidi Maazat di Komisi V DPR RI. Bukan saja menambahkan jatah 'kue' infrastruktur baru, namun juga menjaga dan mempertahankan yang telah ada.

Seperti yang disampaikan oleh Syahrul Aidi pada saat kegiatan normalisasi Over Dimensi Over Loading (ODOL) Dirjend Hubungan Darat Kemenhub yang dipusatkan di Terminal Bandara Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru, Selasa (16/02/2021).

Dalam sambutannya, Syahrul Aidi menyampaikan kepada Dirjend Hubdat, Budi Setiady, bahwa hampir semua jalan di Riau hancur karena operasional kendaran melebihi tonasenya. Contoh, ada kendaraan pengangkut CPO yang standarnya adalah 16 ton, namun kenyataannya adalah 21 ton.

"Kendaraan melebihi tonase ini yang selalu merusak jalan di Riau. Kita tidak ingin, jalan-jalan yang telah dibangun ini dengan mudahnya hancur karena kendaraan over kapasitas ini. Nah, ini merupakan wilayah kerjanya Kemenhub. Kita meminta agar Kemenhub mensriusi hal ini." kata Syahrul Aidi.

Dia juga menyoroti adanya praktik illegal para pengangkut CPO dan minyak lainnya melakukan kencing di jalan. Kencing di jalan maksudnya mereka mengurangi tonase dengan cara mengeluarkan barangnya di tempat illegal dan menjualnya secara illegal.

"Perlu adanya tindakan komprehensif atas persoalan-persoalan ini. Nanti saya berencana akan mengajak keliling BPTD (Balai Pengelolaan Transportasi Darat-red) Wilayah Riau untuk berkeliling, melakukan koordinasi dengan seluruh Dishub kabupaten kota. Kita akan mencari rumusan bagaimana caranya persoalan jalan, pelayanan transportasi dan lainnya dapat kita kita carikan solusinya" tambahnya.

Syahrul menyadari, penindakan dan pengawasan oleh stake holder akan mendapat komplain dari banyak pihak. Terutama pengusaha sektor transportasi. Dan itu harus dicarikan solusi juga.

"Dengan solusi yang tepat, tak ada pihak yang dirugikan. Pengusaha nyaman berusaha, kecelakaan diminimalisir, jalan pun tidak rusak" tutupnya.

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.
Anggota Komisi V DPR RI

“Perlu adanya tindakan komprehensif atas persoalan-persoalan ini. Nanti saya berencana akan mengajak keliling BPTD (Balai Pengelolaan Transportasi Darat-red) Wilayah Riau untuk berkeliling, melakukan koordinasi dengan seluruh Dishub kabupaten kota. Kita akan mencari rumusan bagaimana caranya persoalan jalan, pelayanan transportasi dan lainnya dapat kita kita carikan solusinya”

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Legislator PKS: Apa Layak KA Bandara Dapat Subsidi?

KUTIPAN

Jakarta (15/02) --- PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat memberikan bantuan berupa subsidi tarif untuk kereta api bandara demi kemudahan para pelanggan. Layak kah KA Bandara dapat subsidi tarif?

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menilai KA Bandara tidak bisa mendapatkan subsidi karena tidak termasuk kereta api dengan layanan mininum.

Selain dinilai tidak tepat, juga berpotensi melanggar UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian.

"Sesuai dengan UU Perkeretaapian, PSO diberikan untuk kereta api ekonomi dengan layanan minimum. Sementara KA bandara apakah termasuk KA ekonomi dengan layanan minimum? Jika melihat fasilitasnya seperti jumlah seat/gerbong, fasilitas TV LED dan wifi gratis, KA bandara tidak bisa dikategorikan sebagai kereta api dengan layanan minimum yang bisa mendapat Public Service Obligation (PSO) atau subsidi." kata Anggota Komisi V DPR RI dari FPKS ini.

Sigit juga menilai pemberian PSO untuk KA Bandara tidak tepat terlebih saat ini jumlah penumpang pesawat anjlok akibat pandemi.

Disisi lain, pemberian PSO pada KA bandara juga berpotensi mematikan bisnis bus dan travel yang menuju bandara.

"Saat penumpang pesawat anjlok sampai lebih dari 50% apakah PSO KA Bandara ada manfaatnya? Penumpang pesawatnya saja berkurang. Apalagi, banyak moda transportasi lain ke bandara yang lebih murah seperti bus Damri. Dan kalau sampai tiket KA lebih murah dari bus, ini sama saja membunuh moda transportasi lain yang tidak dapat subsidi, " Kata Sigit.

Sigit menduga permintaan PSO untuk KA Bandara adalah untuk menutupi kerugian KA Bandara yang selama ini sepi penumpang.

"Anggaran kita terbatas, sebaiknya PSO juga diberikan untuk hal-hal yang lebih prioritas. Masih banyak KA ekonomi yang perlu dihidupkan terutama yang jarak jauh karena itu yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Sigit.

Sigit juga mempertanyakan penambahan anggaran PSO kereta api yang dinilainya tidak sejalan dengan penurunan jumlah penumpang disaat pandemi.

Menurut Sigit, besaran PSO seharusnya berkurang seiring dengan penurunan jumlah penumpang.

"Dalam Rapat Kerja dengan Kemenhub belum lama ini saya juga mempertanyakan kenaikan anggaran PSO padahal jumlah penumpangnya terjun bebas. Jumlah penumpang anjlok, kok PSO nya naik," tanya Sigit.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menyubsidi tarif kereta api kelas ekonomi hingga Rp3,4 triliun pada 2021. Jumlah tersebut naik sekitar Rp900 miliar dari PSO kereta api tahun 2020 yang mencapai Rp 2,5 triliun.

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

“Saat penumpang pesawat anjlok sampai lebih dari 50% apakah PSO KA Bandara ada manfaatnya? Penumpang pesawatnya saja berkurang. Apalagi, banyak moda transportasi lain ke bandara yang lebih murah seperti bus Damri. Dan kalau sampai tiket KA lebih murah dari bus, ini sama saja membunuh moda transportasi lain yang tidak dapat subsidi”

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

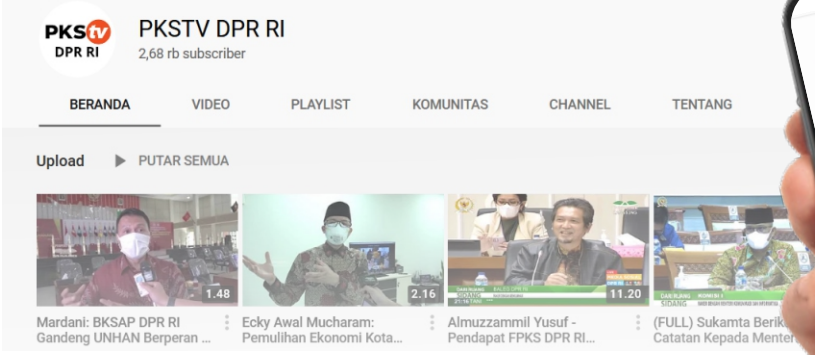

TERIMA KASIH

atas dukungan dan partisipasinya
untuk Channel PKSTV DPR RI

Aleg PKS Minta Pemerintah Serius Tertibkan Manajemen Garuda Sampai Tuntas

KUTIPAN

Jakarta (12/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menanggapi rencana Pemerintah untuk menertibkan manajemen Garuda Indonesia agar bisa lebih baik di kemudian hari.

Menurut Mahfudz, Garuda Indonesia sebagai maskapai milik pemerintah, harus dibenahi dan ditertibkan, supaya bisa meraih untung dan mandiri, tidak sebaliknya menjadi beban pemerintah.

"Seperti yang selama ini terjadi. Termasuk membenahi kontrak-kontrak pembelian dan penyewaan Pesawat yang disinyalir bermasalah dan ujungnya membuat Garuda merugi. Ini harus dijadikan momentum untuk menertibkan semua hal yang belum beres di Garuda," ungkap Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

"Kita dikejutkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara Erick Tohir selaku Menteri BUMN RI dan Direktur Utama Garuda saudara Irfan Setiaputra, terkait persoalan sewa 12 pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen, dengan pihak Nordic Aviation Capital (NAC)," ungkap pria yang akrab disapa Mahfudzi ini.

Mahfudz menambahkan,betapa selama ini Garuda menanggung kerugian yang besar selama mengoperasikan pesawat tersebut. bayangkan sejak 2012, Garuda menanggung rugi sebesar US$ 30 Juta, yang dalam Rupiah sekitar 419 Miliar per tahun, berarti selama delapan tahun menanggung rugi yang sangat besar tiap tahunnya.

"Wajar saja selama ini Garuda menabung kerugian, bukan menabung untung. ini baru dari urusan pesawat CRJ1000, belum lagi urusan lain," ungkap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

"Kita dukung penuh tekad Garuda untuk mengembalikan 12 pesawat tersebut, buat apa dipertahankan. Jadi beban yang berat untuk kita," terangnya.

Sejak awal pemilihan pesawat tersebut, imbuh Mahfudzi, tidak tepat. Karakteristik pesawat tersebut tidak cocok di Indonesia.

"Landasan bandara kita pendek, belum lagi kapasitas bagasi pesawat tersebut kecil dan biaya perawatan yang mahal. kita tidak paham, kenapa Direksi Garuda pada masa itu memilih pesawat ini. Salah pilih yang bikin Garuda menanggung perih," lanjut Bendahara Umum DPP PKS ini.

Terkait dengan ancaman gugatan dari Nordic Aviation Capital kepada Garuda, secara tegas Mahfudz Abdurrahman menyampaikan jangan takut Garuda!. Hadapi saja gugatan dari lessor tersebut.

"Yang penting kita siapkan data dan argumen yang kuat. kita harus serius membenahi Garuda, supaya Garuda bangkit menjadi maskapai yang kuat di dalam negeri dan tidak selalu menjadi beban bagi Pemerintah. ini pil pahit yang harus ditelan, untuk mewujudkan BUMN penerbangan kita yang sehat. Saya juga menitip pesan ke jajaran Kementerian BUMN RI, khususnya kepada saudara Erick Tohir, untuk juga meneliti lebih mendalam ke BUMN lain. Bukan tidak mungkin mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Garuda," papar Mahfudzi.

Mahfudz menambahkan, kondisi pada Garuda Indonesia, disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja atau bisa jadi ada kesengajaan, demi mendapatkan keuntungan pribadi. kita tidak berharap itu terjadi, tapi perlu didalami.

"Kita jadikan peristiwa di Garuda ini sebagai pemacu dan pemicu untuk mewujudkan BUMN yang berakhlak baik", tutup Mahfudz Abdurrahman.

H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Komisi VI DPR RI

"Yang penting kita siapkan data dan argumen yang kuat. kita harus serius membenahi Garuda, supaya Garuda bangkit menjadi maskapai yang kuat di dalam negeri dan tidak selalu menjadi beban bagi Pemerintah"

Anggota FPKS: Kasus PT Asabri, PR Besar Pemerintah dalam Mengelola BUMN

KUTIPAN

Jakarta (16/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi, Nevi Zuairina sangat prihatin dengan gejolak kasus besar yang menimpa BUMN yang merupakan wajah Negara dalam mengelola aset bangsa.

Pasalnya, kata Nevi, belum juga selesai kasus yang menjerat perusahaan BUMN PT Asuransi Jiwasraya, muncul lagi kasus baru yang menimpa perusahaan BUMN Asuransi lainnya yaitu PT Asabri.

Bahkan dalam konferensi persnya pada Senin, (01/02/2021), kata Nevi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kerugian uang negara yang telah dihitung oleh Tim Penyidik Kejagung yaitu sebesar Rp 23,7 trilun, lebih besar dari jumlah kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya yaitu sebesar Rp16,81 triliun, meskipun saat ini pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menghitung berapa besar kerugian negara dari kasus yang ada di PT Asabri.

"Terus bermunculannya kasus yang menimpa perusahaan BUMN menandakan bahwa pengelolaan BUMN masih sangat perlu diperbaiki lagi. Dan ini menjadi PR besar Pemerintah untuk dapat memperbaiki tata kelola BUMN, agar kedepannya BUMN yang ada dapat memberikan kontribusi bagi negara dan juga rakyat Indonesia", Kata Nevi Zuairina.

Nevi mengatakan, sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah BUMN di Indonesia ada sebanyak 142 perusahaan. Bila dihitung dengan anak cucu perusahaan, maka total bisa mencapai 800 perusahaan di bawah naungan BUMN.

"Namun sayangnya kontribusi BUMN dalam memberikan deviden ke negara tidak maksimal. Menurut data yang dipublikasikan oleh Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2018 total penerimaan pemerintah dari pembayaran deviden BUMN hanya sebesar RpRp 45,06 triliun dan itu sekitar Rp38,74 triliun atau setara dengan 85,97% dari total dividen yang diterima pemerintah ternyata hanya berasal dari 10 BUMN saja," kritik Anggota FPKS ini.

Politisi PKS ini memaparkan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kejagung pada Februari 2021, kasus PT Asabri ini diawali dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh manajemen PT Asabri periode 2011-2016 dan periode 2016-2020 dengan Benny Tjokrosa-putro (BTS) alias Bentjok dan Heru HIdayat (HH) untuk mengatur dan mengendalikan portofolio investasi Asabri dalam bentuk saham dan reksa dana.

"Banyak hal yang sangat disayangkan, salah satunya kesepakatan yang diambil oleh kedua orang yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi tersebut justru membuat rugi perusahaan dan sebaliknya yang diuntungkan adalah kedua pihak tersebut," terang Nevi.

"Pembenahan tata kelola BUMN seharusnya diawali dengan pembenahan jajaran Direksi dan Komisaris yang ada di perusahaan BUMN, mengingat posisi mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan BUMN", imbuh Nevi.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II ini menambahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN khususnya pada Pasal 16 dan Pasal 28 telah mengamanat-kan bahwa pengangkatan direksi dan komisaris BUMN harus berdasarkan pertimbang-an integritas, jujur, perilaku yang baik, keahlian, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

> "BUMN sebagai badan usaha yang didanai negara melalui APBN, sudah seharusnya rakyat Indonesia mengetahui bagaimana kondisi badan usaha yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia tersebut. "

Wakil Ketua Fraksi PKS Minta Pemerintah Hapus Ketimpangan Listrik Nasional

KUTIPAN

Jakarta (11/02) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah melalui Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menuntaskan masalah ketimpangan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

Mulyanto menilai, sangat tidak pantas ketika negara ini terjadi kelebihan (surplus) pasokan listrik tetapi masih ada wilayah tertentu yang belum tersentuh layanan listrik.

"Pemerataan listrik ini adalah soal keadilan sosial. Pasalnya menjadi aneh kalau di tengah surplus listrik, yang mencapai lebih dari 30% sebagaimana terjadi sekarang ini, namun masih ada daerah-daerah di Indonesia yang gelap gulita," ungkapnya.

Untuk diketahui, tegas Mulyanto, di Jawa-Bali misalnya, tingkat elektrifikasi sudah mendekati angka 100 persen, namun di wilayah Indonesia timur, NTT, Kalimantan Barat, dll. tingkat elektrifikasi ini masih jauh di bawah 90 persen.

Berdasarkan laporan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI disebutkan sedikitnya ada 433 desa yang masih belum teraliri listrik.

Sementara jumlah RT yang sudah teraliri listrik sebesar 74,5 juta rumah tangga atau sebanyak 97 persen dari total RT secara nasional yaitu 77 juta rumah tangga.

Sementara itu data BPS tahun 2020 menyebutkan ada sebanyak 98.9 % rumah tangga secara nasional menggunakan listrik, baik dari PLN ataupun non-PLN. Sedangkan di Papua rasio penggunaan listrik di tingkat rumah tangga ini adalah yang terendah, yakni hanya sebesar 73.8%.

"Artinya, masih banyak rumah tangga dan saudara-saudara kita di daerah tersebut yang tidak dapat menikmati listrik. Ini ironi. Sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka namun mereka masih belum merdeka dari kegelapan," terang Mulyanto.

PLN berjanji, kata Mulyanto, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI tahun lalu bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020, tingkat elektrifikasi secara nasional akan mencapai angka 100%. Namun nyatanya, sampai hari ini, lebih dari setengah tahun, janji itu masih tinggal janji.

Mulyanto menambahkan PKS mendesak Pemerintah bekerja ekstra keras dalam memberikan pemerataan listrik bagi warga, sesuai dengan fungsi negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai wujud dari pemerataan dan keadilan bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Untuk itu menjadi penting membangun jaringan listrik interkoneksi yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi dengan baik," katanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

> "Sangat tidak pantas ketika negara ini terjadi kelebihan (surplus) pasokan listrik tetapi masih ada wilayah tertentu yang belum tersentuh layanan listrik. Pemerataan listrik ini adalah soal keadilan sosial. Pasalnya menjadi aneh kalau di tengah surplus listrik, yang mencapai lebih dari 30% sebagaimana terjadi sekarang ini,

Kunker ke BIG, Rofik Pertanyakan Timeline Program Kebijakan Satu Peta

KUTIPAN

Bogor (11/02) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mengatakan, sangat mendukung program prioritas nasional terkait percepatan kebijakan satu peta yang sudah menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Saya sangat mendukung program prioritas nasional terkait dengan pecepatan kebijakan satu peta yang sudah menjadi konsen pemerintah pusat Pak Jokowi. Karena dengan tidak adanya one map policy ini dampaknya kemana-mana," kata aleg dari Dapil Jateng VII ini.

Dia mengatakan hal itu saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial BIG dan Pusat Pengembangan dan Inovasi Iptek LIPI di Cibinong Bogor Jawa Barat, Kamis (11/02).

Rofik menambahkan, dengan tidak adanya one map policy ini menyebabkan 40,6 persen pembangunan infrastruktur menjadi tumpang tindih. Dan hal ini pasti akan berdampak pada inefisiensi dan tidak optimalnya anggaran negara untuk masyarakat.

"Saya mau bertanya kepada Kepala BIG, kapan diselesaikan rencana program percepatan kebijakan satu peta ini? Karena ini sudah cukup urgen, ini sangat penting. Mohon jawabannya," kata aleg asal Kabupaten Purbalingga itu.

Sesuai paparan BIG, pelaksanaan Perpres 9 Thn 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada skala 1:50.000. Sampai Desember 2019 telah diselesaikan kompilasi 84 peta tematik dari 85 peta peta tematik.

Satu peta tematik yang belum selesai adalah batas administrasi desa/kelurahan.Sementara amanah Presiden pada Ratas tentang KSP tanggal 6 Februari, batas administrasi desa/kelurahan ditargetkan selesai pada Desember 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Rofik mengapresiasi inisiasi LIPI yang sudah membuat terobosan-terobosan yang sangat menarik. Diharapkan hal ini bisa ditiru lembaga-lembaga lainnya, terkait dengan inisiasi SBSN untuk proyek-proyek LIPI.

"Ada juga inisiasi yang sedang dikembangkan adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Mohon penjelasannya terkait dengan program ini. Karena dengan inisiasi ini LIPI telah membebaskan anggaran-anggaran APBN untuk operasional dan maintenance," kata Rofik.

Berarti LIPI ada hasil dari kerja sama dengan para mitra. Rofik memperkirakan hal ini tidak hanya ada di LIPI. Karena banyak lembaga lain yang mempunyai peluang untuk menjalin kerja sama dengan mitra.

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Komisi VII DPR RI

> "Saya mau bertanya kepada Kepala BIG, kapan diselesaikan rencana program percepatan kebijakan satu peta ini? Karena ini sudah cukup urgen, ini sangat penting. Mohon jawabannya"

Sementara kepada Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG Dr Ing-Khafid, Rofik meminta info dari 80 wilayah dan daerah yang ikut asistensi, apakah ada dari Dapil Jawa Tengah VII. Jika belum ada, dia minta informasi lebih lengkap untuk bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan yang terkait.

"Kepada Ibu Astrid, Dapil saya termasuk sedang dilakukan batas wilayah. Untuk itu saya minta infonya," ujar Rofik Hananto.

Eksplorasi Blok Migas Sijunjung Masih Terhambat Sejumlah Kendala

KUTIPAN

Sijunjung (13/02) Anggota Komisi VII DPR RI Tiffatul Sembiring menggambarkan sejumlah aspek yang menjadi kendala terhambatnya kegiatan eksplorasi Blok South West Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang dikelola PT Rizki Bukit Barisan (RBB).

Anggota Komisi VII DPR RI Tiffatul Sembiring menggambarkan sejumlah aspek yang menjadi kendala terhambatnya kegiatan eksplorasi Blok South West Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang dikelola PT Rizki Bukit Barisan (RBB). Sebab menurut rencana SKK Migas dengan PT RBB, produksi baru akan mulai berjalan pada tahun 2023 mendatang, sehingga meleset dari target sebelumnya pada tahun 2020 lalu.

"Jadi kalau kita ambil dari visibility studies, perlu dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari aspek teknikalnya, SDM sudah oke dan sarpras sudah ada. Kemudian aspek ekonomi, juga harus dilihat supply dan demand-nya, hingga dampak bagi perekonomian daerah nantinya. Selanjutnya aspek legalitas, sejauh ini bupati selaku pemerintah daerah sudah mendukung dan semua sudah oke," kata Tiffatul usai pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan mitra kerja terkait, di Sijunjung, Kamis (12/1/2020).

Kendala berikutnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, terkait masalah sistem kerja sama antar instansi. Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai salah satu potential buyer harus dipastikan apakah betul-betul tertarik untuk menggunakan potensi gas bagi sumber pendukung kegiatan operasinya.

"Sementara kalau melihat kurva PLN, jika telah mencapai peak load, maka urutannya akan menggunakan PLTA, kemudian PLTU guna mengisi kebutuhan beban itu tadi. Selanjutnya barulah PLTD, kemudian yang paling terakhir digunakan yakni PLTG. PLTG paling terakhir dalam kurva, jawabannya karena gas itu mahal jika dioperasikan untuk listrik. Selama PLN masih punya PLTA dan PLTU, serta cadangan baru bara masih banyak, buat apa membeli gas? Tentu akan menjadi tidak ekonomis," tegasnya.

Meski tidak dapat dipungkiri bahwa gas bumi merupakan salah satu clean energy, atau sebagai energi transisi dari fossil energy menuju energi baru terbarukan (EBT), namun Tiffatul menyangsikan PLN akan mampu menyerap pasokan gas secara penuh, terlebih jika melihat besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan.

"Kalaupun nantinya mereka (PLN, red) mendapat intervensi, tetap saja harus ekonomis. Ya, mungkin saja mereka beli tetapi tidak banyak. Mungkin dibeli sedikit lah. Tapi kalau secara hukum ekonomi tidak menguntungkan, ngapain keluar duit terus, nanti kinerjanya malah jadi nggak bagus. Makanya, kita harus ketemu dan harus clear, jangan kasih PHP terus. Setelah ini kita follow up terus. Sijunjung harus segera aktif, PT RBB jangan pasif menunggu saja, tetapi harus dikawal terus perkembangannya sampai dimana," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
Dapil Sumatera Utara I

"Jadi kalau kita ambil dari *visibility studies,* perlu dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari aspek teknikalnya, SDM sudah oke dan sarpras sudah ada. Kemudian aspek ekonomi, juga harus dilihat supply dan demand-nya, hingga dampak bagi perekonomian daerah nantinya.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN

Soroti Polemik Kebijakan Santunan Covid-19 Kemensos, Aleg PKS: Rakyat Gusar dengan Gimmick!

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Terkait surat keterangan hasil pemeriksaan/uji lab, nyatanya masih ada keluarga korban yang mengalami kendala karena tidak bisa memperoleh hasil uji lab. Hal ini cukup beralasan mengingat sejumlah korban Covid-19 tidak sempat melakukan uji lab sebelumnya karena kondisinya yang terlanjur kritis saat masuk ke RS dengan status suspek Covid-19, Jika case-nya demikian, lanjutnya, apakah ahli waris korban tetap bisa memperoleh haknya? Bagaimana langkah antisipasi Kemensos untuk kondisi extraordinary tersebut?,

Soroti Polemik Kebijakan Santunan Covid-19 Kemensos, Aleg PKS: Rakyat Gusar dengan Gimmick!

KUTIPAN

Boyolali (19/02) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti kebijakan pemerintah untuk memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta kepada warga yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Sosial (Kemensos) tentang Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19.

Untuk diketahui, per 17 Februari 2021 tercatat total kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebanyak 33.788 jiwa.

"Awalnya saya menghargai itikad baik pemerintah untuk membantu masyarakat melalui santunan ini. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, saya hanya menemukan fakta bahwa masyarakat maupun pelaksana dipersulit oleh ketidakpastian dari pemerintah pusat," kritiknya.

Sebagai informasi, untuk memperoleh santunan, keluarga atau ahli waris korban harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi ke Dinas Sosial setempat. Adapun beberapa persyaratan tersebut yakni surat kematian dari RS setempat dan surat keterangan hasil pemeriksaan yang menyatakan positif Covid-19.

"Terkait surat keterangan hasil pemeriksaan/uji lab, nyatanya masih ada keluarga korban yang mengalami kendala karena tidak bisa memperoleh hasil uji lab. Hal ini cukup beralasan mengingat sejumlah korban Covid-19 tidak sempat melakukan uji lab sebelumnya karena kondisinya yang terlanjur kritis saat masuk ke RS dengan status suspek Covid-19," jelasnya.

Jika case-nya demikian, lanjutnya, apakah ahli waris korban tetap bisa memperoleh haknya? Bagaimana langkah antisipasi Kemensos untuk kondisi extraordinary tersebut?," ungkapnya retoris.

Lebih lanjut, politisi PKS ini juga mencermati keberjalanan proses penyaluran santunan kepada keluarga korban Covid-19 yang dilakukan sejauh ini oleh Kemensos. Dalam temuannya saat audiensi dengan Dinas Sosial tingkat Kota/Kabupaten, ia menyesalkan lambatnya proses pencairan dana oleh pemerintah pusat kendati Dinas Sosial telah lama mengajukan sejumlah rekomendasi permohonan ahli waris kepada Kemensos.

Dari informasi yang dihimpun Bukhori, Dinas Provinsi Jawa Tengah bahkan telah menerima sebanyak 2.174 dokumen usulan ahli waris yang diajukan ke Kemensos. Meskipun begitu, dalam catatan yang diterima, hanya 7 warga Jawa Tengah yang baru menerima realisasi pencairan dana santunan dengan rincian; 3 orang untuk Kabupaten Brebes, 1 orang untuk Kabupaten Kendal, 2 orang untuk Kabupaten Blora, dan 1 orang untuk Kabupaten Boyolali.

"Sampai detik ini saya tidak menemukan adanya kejelasan, bahkan keseriusan Menteri Sosial dalam mengawal realisasi program ini. Jika memang tidak jelas sumber dananya, maka seharusnya tidak perlu disampaikan ke masyarakat," ungkapnya.

Sementara di saat yang bersamaan, demikian Anggota Baleg ini melanjutkan, ada ribuan masyarakat, misalnya untuk di Jawa Tengah saja, yang sudah mengajukan permohonan namun nasibnya masih terkatung-katung karena menanti kepastian dari pemerintah.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Awalnya saya menghargai itikad baik pemerintah untuk membantu masyarakat melalui santunan ini. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, saya hanya menemukan fakta bahwa masyarakat maupun pelaksana dipersulit oleh ketidakpastian dari pemerintah pusat"

HNW Dukung Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Ulama Pejuang

KUTIPAN

Jakarta (13/02) --- Anggota DPR yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mendukung usulan dan rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk dua ulama besar Indonesia, Syaikhona KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri.

"Saya sebagai santri, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Islam rahmatan lil alamin yang mementingkan untuk bisa bersama seluruh komponen berkhidmat untuk maslahat Umat dan Bangsa, sangat mendukung penganugrahan gelar Pahlawa Nasional itu. Dan sangat wajar bila secara resmi PKS sangat mendukung penuh usulan dan rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk kedua Ulama Pejuang tersebut. Dukungan resmi terhadap penganugrahan gelar Pahlawan Nasional itu disampaikan oleh Ketua FPKS DPR RI, Dr Jazuli Juwaini, saat melaunching program Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan di Fraksi PKS di DPR RI"ujarnya melalui siaran Pers di Jakarta, Jumat (12/02/2021).

HNW sapaan akrabnya mengatakan hal tersebut sebagai bukti bahwa Bangsa dan Negara tidak melupakan sejarah perjuangan para Pahlawan, dan tidak menghilangkan jasa para Ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan Indonesia menjadi negara merdeka. Sebagaimana sudah dilakukan oleh para Ulama pejuang melalui keanggotaan mereka di BPUPK, Panitia 9 dan PPKI.

Selain Itu, ada pula kiprah dan perjuangan para Ulama dengan Fatwa Jihad yang dikumandangkan oleh KH M. Hasyim Asy'ari dan KH Wachab Hasbullah (NU), maupun melalui Amanat Jihad yang digelorakan oleh Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) dan lain sebagainya. Maupun perjuangan para Ulama melalui Ormas Islam lainnya seperti PUI (KH. Abdul Halim), atau juga yang melalui Partai Islam (Masyumi) seperti dilakukan oleh M. Natsir.

"Banyak diantara mereka yang telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Negara Republik Indonesia. Tapi masih banyak juga yang belum mendapatkan pengakuan resmi dari Negara dengan mendapatkan anugerah sebagai Pahlawan Nasional seperti Syaichona Cholil dan KH Bisri Syansuri, padahal Beliau berdua juga telah berjasa dengan perjuangannya yang luar biasa untuk perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia," jelasnya.

Lebih Lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa dua tokoh tersebut telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus untuk menerima gelar pahlawan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Ketentuan Pasal 25 memuat syarat umum, diantaranya, adalah memiliki integritas, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik serta setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

> "Banyak diantara mereka yang telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Negara Republik Indonesia. Tapi masih banyak juga yang belum mendapatkan pengakuan resmi dari Negara dengan mendapatkan anugerah sebagai Pahlawan Nasional seperti Syaichona Cholil dan KH Bisri Syansuri, padahal Beliau berdua juga telah berjasa dengan perjuangannya yang luar biasa untuk perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia"

Arab Saudi Larang Masuk Jemaah Umroh WNI

Anggota FPKS: Patuhi Prokes! Agar Dapat Ibadah ke Baitullah

KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. dalam agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) Anggota DPR RI

di kediaman Ernawan, Bendahara DPC PKS Cimanggis, di Kelurahan Tugu Kota Depok, pada Sabtu (6/2), Nur Azizah sebutkan, akibat lonjakan kasus Covid-19, saat ini Pemerintah Arab Saudi telah melarang 20 negara mendatangkan jemaah umroh ke Arab Saudi, dan Indonesia salah satu diantaranya.

"Beberapa hari lalu Kerajaan Arab Saudi telah memblokir 20 negara untuk masuk ke Arab Saudi, dimana negara-negara ini yang termasuk Indonesia didalamnya, merupakan negara-negara dengan kasus Covid-19 yang tinggi dan terus melonjak", terang Nur Azizah.

Pada kegiatan yang turut dihadiri Sekertaris DPra PKS Kelurahan Tugu, Ahmad Syihan Isma'il, Bendahara DPC Cimanggis, Ernawan, serta 15 perwakilan warga RT 02, RW 11 Kelurahan Tugu, Nur Azizah menerangkan bahwa perlonjakan kasus Covid-19 di Indonesia salah satunya karena warga yang lalai dengan protokol Kesehatan. Menurut Nur Azizah, masih banyak masyarakat Indonesia, yang masih melalaikan, menganggap enteng bahkan tidak percaya dengan keberadaan Virus ini.

"Sejak pembatalan haji tahun lalu di 2020, banyak calon Jemaah haji maupun umroh mengadu ke Komisi VIII, mereka merasa kecewa dengan keputusan Pemerintah. Namun kembali lagi, larangan ini muncul karena Arab Saudi melarang juga demi kebaikan warga negara Indonesia. Jika semua masyarakat Indonesia sudah patuh protokol, dan kasus Covid-19 dapat ditekan, maka hal itu akan berimplikasi pada perizinan keberangkatan haji maupun umroh. Jika kasus Covid di Indonesia menurun, tentu masyarakat tetap bisa beribadah ke Baitullah, tentu dengan prokes khusus. Tapi, faktanya malah melonjak tinggi", jelas Nur Azizah.

Salah satu dampak Covid-19 khususnya bagi umat Islam di beberapa negara termasuk Indonesia adalah penundaan ibadah Haji dan Umroh. Nur Azizah menjelaskan bahwa bagi umat muslim khususnya yang belum pernah ke tanah suci sangat mendambakan untuk pergi beribadah ke Baitullah. Hal ini tentu bisa menjadi motivasi kita untuk menjaga prokes. Jika kasus Covid di Indonesia turun, tentu pemerintah Arab Saudi akan kembali memberikan izin bagi warga negara Indonesia untuk beribadah haji dan umroh. Mudah-mudahan semua segera pulih kembali.

Nur Azizah turut menghimbau agar warga Depok tetap patuhi protokol kesehatan 3 M, serta memegang teguh prinsip Iman, Imun dan Aman. "Selalu saya berpesan dalam setiap pertemuan saya dengan warga, jangan pernah melupakan protokol kesehatan 3M, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan Memakai masker, dan sebagai tambahan, sebagaimana pesan dari kapoksi saya di DPR RI, untuk senantiasa menghimbau warga agar terus menerapkan tambahan tiga prinsip yaitu Iman, Imun dan Aman.", jelas Nur Azizah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Jika semua masyarakat Indonesia sudah patuh protokol, dan kasus Covid-19 dapat ditekan, maka hal itu akan berimplikasi pada perizinan keberangkatan haji maupun umroh. Jika kasus Covid di Indonesia menurun, tentu masyarakat tetap bisa beribadah ke Baitullah, tentu dengan prokes khusus. Tapi, faktanya malah melonjak tinggi"

BPJS Kesehatan Surplus 18,7 Triliun, Mufida: Kembalikan Iuran Seperti Semula

KUTIPAN

Jakarta (12/02) --- Keuangan BPJS Kesehatan mengalami surplus cukup besar yaitu Rp. 18,7 Triliun justru disaat pandemi covid-19. BPJS bahkan tidak lagi gagal membayar klaim ke Rumah sakit maupun faskes lainnya.

Surplus ini menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan setelah pihak manajemen bersama pemerintah melakukan pembenahan berdasarkan hasil audit menyeluruh yang dilakukan oleh BPKP pada 2018-2019.

Menanggapi informasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta agar pihak BPJS Kesehatan meninjau kembali kenaikan tarif khususnya untuk tarif kelas 3 yang diberlakukan sejak tahun lalu berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020. Berdasarkan Perpres tersebut tarif peerta kelas 1 naik menjadi Rp. 150 ribu, kelas 2 Rp. 100 ribu dan kelas 3 Rp. 35 ribu dengan adanya subsidi Rp. 7000.

Mufida menyatakan dengan adanya surplus ini, sudah selayaknya iuran BPJS khususnya kelas 3 dikembalikan seperti semula yaitu Rp. 25.500.

"Direksi BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa kerjanya, harusnya menutup masa kerjanya dengan memberikan kado terbaik untuk rakyat dengan menurunkan premi BPJS Kesehatan sama dengan besaran premi yang lama," papar Mufida dalam keterangannya.

Sejak awal pemberlakukan Perpres 64/2020 ini Mufida mengatakan dirinya bersama Fraksi PKS DPR sudah menolak adanya kenaikan iuran bagi peserta kelas 3 pada kelompok Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Kenaikan iuran disaat ekonomi masyarakat sangat terpukul akibat pandemi covid-19 tentu saja sangat memberatkan.

"Apalagi bagi kelompok Bukan Pekerja dan PBPU yang sangat terdampak usahanya akibat pandemi ini. Bahkan akibat kenaikan tarif yang dibelakukan, banyak peserta kelas 1 dan kelas 2 yang turun kelas. BPJS Kesehatan sendiri mengakui adanya sekitar 2,2 juta peserta yang turun kelas khususnya dari kelompok PBPU," tutur Mufida.

Mufida mengatakan saat itu dirinya sudah mengingatkan agar BPJS Kesehatan melakukan audit menyeluruh dan melakukan pembenahan terhadap data kepesertaan. Manajemen BPJS juga tidak tranparan berapa peserta BP dan PBPU untuk masing-masing kelas. Selama ini yang disampaikan hanya total peserta BP dan PBPU.

Mengacu data yang disampaikan BPJS, sampai Oktober 2019, total peserta kedua kelompok ini adalah 35,923,299. Sementara menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, per Mei 2020 jumlah peserta PBPU adalah 30,68 juta.Jika diasumsikan seluruhnya berada di kelas 3 saja, maka nilai selisih iuran lama dengan iuran setelah kenaikan selama setahun adalah sebesar Rp. 4,09 triliun. Bahkan jika selisihnya menggunakan angka kenaikan resmi tanpa adanya subsidi pemerintah daerah yaitu Rp. 42.000, nilai selisihnya hanya sekitar Rp. 7,1 triliun.

Artinya, papar dia, keuangan BPJS harusnya masih cukup baik tanpa menaikan tarif kelas 3 untuk peserta BP dan PBPU, bahkan tanpa membebani pemerintah daerah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

> "Direksi BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa kerjanya, harusnya menutup masa kerjanya dengan memberikan kado terbaik untuk rakyat dengan menurunkan premi BPJS Kesehatan sama dengan besaran premi yang lama"

Sanksi Buat Penolak Vaksin

Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Langgar Kesepakatan dengan DPR

KUTIPAN

Jakarta (17/02) --- Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi menjadi dasar hukum pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani dalam keterangan media, mengkritik kebijakan tersebut sebagai inkonstitusi.

"Pemerintah melanggar kesimpulan rapat kerja dengan Komisi IX pada 14 Januari 2021 (poin 1 huruf g) yang menyepakati bahwa pemerintah tidak mengedepankan denda atau pidana. Saya menilai sikap ini menunjukkan ketiadaan itikad baik pemerintah, sebab Tatib DPR RI menyebutkan hasil rapat baik berupa keputusan atau kesimpulan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Bagaimana rakyat mau ikut aturan, jika pemerintah sendiri melanggarnya," ungkap Netty.

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, pendekatan denda dan sanksi atas sesuatu yang bersifat pilihan berpotensi melahirkan bibit otoritarian.

"Rakyat sedang menikmati demokrasi, maka negara harus terus memperbaiki diri dengan melakukan pendekatan persuasif melalui edukasi dan komunikasi. Denda atau sanksi atas sesuatu yang ada ruang pilihan, dapat membuat rakyat berpikir pemerintah menggunakan tangan besi. Jangan sampai karena tidak sependapat dengan pemerintah, negara mencabut hak fundamental rakyat akan jaminan sosial dan layanan administratif," tutur Netty.

Netty kembali mengingatkan pemerintah agar memperbaiki pola komunikasi publiknya sehingga masyarakat memahami tujuan program, memiliki kesadaran, dan akhirnya bersedia mengikuti secara sukarela.

"Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman, betapa kelemahan komunikasi publik hanya menimbulkan kebingungan, kepanikan, bahkan civil disobedience, pembangkangan sosial," lanjut politikus PKS asal Jawa Barat ini.

Selain itu, kata Netty, pemberian denda dan sanksi akan membuat masyarakat makin tertekan dan terbebani di tengah dampak sosial ekonomi pandemi yang menambah jumlah penduduk miskin Indonesia.

Badan Pusat Statistik merilis pada September 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19 persen.

"Bagaimana masyarakat tidak abai soal denda vaksin, jika untuk urusan kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang saja mereka masih kesulitan. Bukankah pemerintah seharusnya memastikan rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan memberikan dukungan? Jangan sampai aturan denda dan sanksi malah membuat negara makin memiskinkan rakyatnya," tutup Netty.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

“Bagaimana masyarakat tidak abai soal denda vaksin, jika untuk urusan kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang saja mereka masih kesulitan. Bukankah pemerintah seharusnya memastikan rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan memberikan dukungan?”

Komisi X Dukung Mata Pelajaran Pancasila dalam Kurikulum

KUTIPAN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan Komisi X DPR RI mendukung secara penuh mata pelajaran Pancasila untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Mengingat, peta jalan pendidikan nasional tidak hanya terdapat pada tingkatan visi pemerintah tetapi juga harus diletakkan sebagai visi negara.

Pemaparan tersebut disampaikan Fikri usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, KNPI dan SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar, di Pendopo Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (15/2/2021).

"Organisasi kepemudaan diwakili SAPMA dan KNPI mengusulkan agar pendidikan Pancasila dihidupkan lagi untuk masuk di kurikulum. Jika, sistem P4 di masa lalu sudah tidak relevan maka pemerintah harus memodifikasi dengan sistem kekinian. Tujuannya, supaya semua pihak dapat terakomodasi. Sebab, Pancasila milik kita semua," ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Sebelumnya, pada audiensi tersebut, organisasi kepemudaan yang diwakili Sekretaris Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar Adrian menyampaikan sejumlah usulan mengenai konsep peta jalan pendidikan. Ia mengusulkan, pentingnya agar segera adanya mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Maka, kami mengusulkan untuk dihidupkan lagi mata pelajaran Pancasila untuk masuk di tiap sekolah. Terlebih, sepanjang pandemi, siswa-siswi saat ini masih melaksanakan pendidikan secara daring sehingga perlu peningkatan kualitas akademis dan pendidikan karakter Pancasila," paparnya.

Seperti diketahui, dalam rapat Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, baru-baru ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga mengusulkan kepada Kemendikbud agar pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

"Penggalian terhadap seluruh khazanah dan tradisi kebudayaan Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan kader-kader dan pelajar Pancasila dalam rangka untuk pendidikan karakter pada masa-masa akan datang," tegas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda merespon.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Nur Purnamasidi (F-Golkar), Andy Muawiyah Ramly (F-PKB), Sakinah Aljufri (F-PKS). Hadir mendampingi, Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh. Serta, Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud Jumeri, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bakrun dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Yaswardi. (pun/sf)

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

> "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Maka, kami mengusulkan untuk dihidupkan lagi mata pelajaran Pancasila untuk masuk di tiap sekolah. Terlebih, sepanjang pandemi, siswa-siswi saat ini masih melaksanakan pendidikan secara daring sehingga perlu peningkatan kualitas akademis dan pendidikan karakter Pancasila"

#RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan
Sabtu, pukul 10.00 WIB
hanya di:
youtube **PKSTV DPR RI**

Anggota FPKS: Penduduk Miskin Bertambah, Akibat Kebijakan Tidak Pro Wong Cilik

KUTIPAN

Jakarta (17/02) --- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis,

Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan September 2019 yang mencapai 24,97 juta orang

Junaidi Auly, selaku Anggota Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk lebih responsif menurunkan angka dari jumlah penduduk miskin.

"Ketika awal pandemi, pemerintah diingatkan agar mengantisipasi secara serius akan adanya penambahan penduduk miskin," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya. Rabu, (17/02).

BPS mencatat jumlah penduduk miskin periode September 2020 naik menjadi dua digit yaitu 10,19 persen dibandingkan September 2019 pada posisi 9,22 persen. Sedangkan penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan menjadi 7,88 persen dibandingkan periode sebelumnya 6,56 persen, dan penduduk miskin di pedesaan naik menjadi 13,2 persen dari 12,6 persen pada September 2019.

Politisi Fraksi PKS asal Lampung ini mengharapkan pemerintah sebaiknya menunda dan membatalkan berbagai kenaikan tarif dan iuran kepada masyarakat guna meminimalisir laju peningkatan jumlah penduduk miskin, apalagi pandemi ini masih belum usai.

Pria yang akrab disapa Bang Jun ini menegaskan ada relevansi kebijakan dengan hasil yang dicapai.

"Untuk itu pemerintah penting melakukan evaluasi berbagai kebijakan dalam rangka menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pengurangan jumlah penduduk miskin," tutup Junaidi.

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.
Anggota Komisi XI DPR RI

“Pemerintah sebaiknya menunda dan membatalkan berbagai kenaikan tarif dan iuran kepada masyarakat guna meminimalisir laju peningkatan jumlah penduduk miskin, apalagi pandemi ini masih belum usai.

Aleg PKS Ingatkan Pemerintah agar Produktif Belanjakan Utang yang Kian Besar untuk Dorong PDB

KUTIPAN

Jakarta (18/02) –– Beberapa hari belakangan, berbagai kalangan menyoroti soal utang dan defisit yang dialami pemerintah Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074,56 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%.

Sementara itu, Pemerintah menargetkan utang baru pada 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun. Sebagian besar utang ini didapat melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp 1.207,3 triliun.

Atas sorotan publik ini, Menteri Keuangan memberikan respon dengan mengatakan bahwa posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Ia juga menjelaskan bahwa negara lain juga mengalami hal yang sama.

Menanggapi sorotan publik terkait peningkatan utang pemerintah ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya.

Anis mengatakan bahwa defisit APBN akan semakin lebar, sebagai akibat dari ekspansi fiskal Pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian di saat Pandemi.

Hal ini terlihat dengan adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2% pada tahun 2019, menjadi 6,3% pada tahun 2020.

"Dan diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7% di tahun 2021," kata Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyampaikan bahwa defisit merupakan langkah normal di saat resesi, akan tetapi perlu berhati-hati.

"Tetap perlu kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan defisit ini," ungkapnya.

Catatan lain yang diberikan oleh Doktor Ekonomi Islam ini, terkait dengan sebagian besar defisit APBN dibiayai oleh utang. Semakin lebar defisit, semakin besar juga utang.

"Untuk memaksimalkan pertumbuhan, tentu utang harus digunakan. Tetapi yang sering terjadi adalah Pemerintah justru gagal membelanjakan uang," paparnya.

Hal ini, kata Anis, tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir yang mencapai Rp 10-30 Triliun setiap tahunnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan, pelebaran defisit ini disebabkan oleh tingginya anggaran Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Akan tetapi, data terakhir menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN hingga akhir tahun 2020 belum maksimal, hanya sebesar 83%.

"Hal ini tentu merugikan, karena utang yang sudah ditarik pemerintah, gagal dimanfaatkan untuk penyelamatan ekonomi nasional," imbuhnya.

Anis juga menyoroti primary balance Indonesia yang dalam beberapa tahun ini selalu tercatat negatif. Ketika primary balance negatif artinya Pemerintah sedang menjalankan kebijakan gali lubang tutup lubang.

"Pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar utang yang lama. Hal ini tentu bukan pertanda baik untuk keberlangsungan fiskal Indonesia," tegas Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

Defisit merupakan langkah normal di saat resesi, akan tetapi perlu berhati-hati. Tetap perlu kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan defisit ini,"

Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan
Fraksi PKS DPR RI
fraksipksdprri
@fpksdprri
fraksi.pks.id

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Belajar dari Skandal Jiwasraya, Aleg PKS Minta Pasal Pengawasan dalam RUU BUMN Diperkuat

KUTIPAN

Jakarta (16/02) --- Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, meminta agar pasal-pasal mengenai pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkuat dalam rancangan revisi undang-undang BUMN (RUU BUMN) yang tahun ini masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI.

Hal tersebut, kata Amin, didasari oleh kenyataan masih banyaknya kasus korupsi di BUMN yang merugikan keuangan negara.

Kasus paling menyita perhatian publik saat ini, imbuhnya adalah skandal Jiwasraya.

"Mengacu pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara mencapai Rp16,81 triliun," paparnya.

BPK, lanjut Amin, menggunakan metode total loss dalam perhitungan kerugian yang ditanggung negara.

"Kebanyakan kasus di BUMN yang merugikan negara disebabkan moral hazard pengelolanya. Dalam skandal Jiwasraya, negara dua kali dirugikan. Pertama, kerugian akibat penyimpangan sebesar Rp16,81 triliun. Kedua, negara harus memberikan suntikan penyertaan modal negara (PMN)melalui BPUI sebesar Rp20 triliun agar PT Jiwasraya tetap dapat menjalankan usahanya. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat tentang peran lembaga yang melakukan pengawasan kepada BUMN", kata Amin Ak.

Dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengawasan BUMN diatur dalam pasal 71 ayat 1 'Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum'. Sedangkan pasal 71 ayat 2 berbunyi 'Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

Dalam pelaksanaannya UU 19/2003 tidak bisa berdiri sendiri karena ada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam pasal 68 dinyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang berbentuk PT diaudit oleh Akuntan Publik.

Selain itu untuk industri sektor Jasa Keuangan masih ada lembaga pengawas lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2011.

Dengan keberadaan beberapa lembaga pengawasan tersebut kenyataannya, kata Amin, proses pengawasan yang ada belum cukup mampu mencegah terjadinya korupsi di BUMN.

Amin pun mengusulkan, terkait sistem dan mekanisme pengawasan BUMN ini, agar ada pembahasan khusus Rancangan revisi UU BUMN dengan BPK, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini penting agar bisa dirumuskan bersama model pengawasan yang tepat agar kasus-kasus korupsi di BUMN bisa dicegah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

AMIN AK,M.M.
Anggota Badan Legislasi DPR RI

> "Terkait sistem dan mekanisme pengawasan BUMN ini, agar ada pembahasan khusus Rancangan revisi UU BUMN dengan BPK, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini penting agar bisa dirumuskan bersama model pengawasan yang tepat agar kasus-kasus korupsi di BUMN bisa dicegah.

Perangi Korupsi Tidak Sekedar Menghukum Tapi Juga Mendidik Pelaku

KUTIPAN

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai bahwa memerangi korupsi ini bukan sekedar menghukum para pelaku,

Melainkan juga bagaimana mendidik semua pihak untuk tidak melakukan dan mengulangi perbuatan tersebut.

"Saya sependapat dengan perwakilan dari Timor Leste, Fransesco Miranda yang mengatakan bahwa memerangi korupsi ini bukan sekedar menghukum, namun juga mendidik yang melibatkan pemimpin agama," ujar Mardani usai memoderatori Webinar South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/2/2021).

Dengan mendidik, khususnya melalui pendekatan agama, lanjut Mardani, diharapkan bisa menumbuhkan kembali moral seseorang untuk tidak kembali melakukan hal yang sama. Atau paling tidak, mencegah orang lain untuk tidak mencontoh atau melakukan hal serupa. Dengan kata lain setidaknya pola tersebut dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia khususnya, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, jika mengacu kepada laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari International Transparency (Transparansi Internasional) pergerakan memerangi korupsi di Indonesia juga negara-negara di kawasan ASEAN masih terbilang sangat lambat.

Pada tahun 2019, hanya tiga Negara Asia Tenggara yang mendapat skor di atas 50 (0 adalah yang paling korup sedangkan 100 adalah yang terbersih dalam IPK-red), yakni Brunei (60), Malaysia (53), dan Singapura (85). Dengan kata lain hanya Singapura di peringkat tiga, dan Brunei Darussalam di peringkat 30, sementara Indonesia di bawah kedua negara tetangga.

"Ini menjadi lampu kuning bagi kita semua untuk segera bergerak memberantas korupsi. Harus ada tindakan yang diambil. Terlebih lagi beberapa bulan mendatang akan digelar sesi khusus Majelis Umum PBB Melawan Korupsi (UNGASS) 2021. Apa peran yang dapat dimainkan oleh anggota parlemen? Atas dasar itulah webinar ini diselenggarakan," jelas politisi Fraksi PKS ini.

Sesi Khusus Sidang Umum PBB Melawan Korupsi (UNGASS) mendatang akan membahas tantangan-tantangan dan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi dan memperkuat kerjasama internasional. Ini akan menjadi momen penting untuk memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi gerakan antikorupsi global.

"Pada sesi khusus tersebut, sebuah deklarasi politik yang ringkas dan berorientasi pada tindakan akan diadopsi setelah proses negosiasi antar-pemerintah di bawah naungan Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC)," pungkasnya. (ayu/es)

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Wakil Ketua BKSAP DPR RI

"Dengan mendidik, khususnya melalui pendekatan agama, lanjut Mardani, diharapkan bisa menumbuhkan kembali moral seseorang untuk tidak kembali melakukan hal yang sama. Atau paling tidak, mencegah orang lain untuk tidak mencontoh atau melakukan hal serupa. Dengan kata lain setidaknya pola tersebut dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia khususnya, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya

Seminar Merajut Nusantara Bakti-Kominfo

Aleg PKS: Kami Dukung Industri Digital di Indonesia

KUTIPAN

Sebagai fungsi pengawasan, Toriq mengungkapkan DPR harus memastikan payung hukum dan anggaran alokasi untuk perkembangan industri digitalisasi Indonesia dapat direaslisasikan pada tataran pelaksanaan dan sesuai dengan target yang diinginkan.

Tasikmalaya (14/02) --- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyebutkan bahwa Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) mencatat kenaikan pada platform penjualan digital sebesar 25 persen selama pandemi.

Hal ini disampaikannya pada kegiatan seminar merajut nusantara yang diinisiasi oleh BAKTI-Kominfo di Kota Tasikmalaya (13/02/2021).

"Oleh karenanya Pemerintah dan DPR akan menggenjot anggaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan membangun BTS di wilayah yang belum terkoneksi internet. Diharapkan industri digital dapat berkembang secara merata di seluruh pelosok negeri", ungkapnya pada seminar yang menggunakan tekhnologi virtual ini.

Berikutnya politisi PKS tersebut menjelaskan kepada para peserta seminar yang berjumlah ratusan ini tentang fungsi DPR dalam mendorong perkembangan Industri Digital di Indonesia. Sebagai fungsi legislasi yakni menyiapkan payung hukum berupa undang-undang.

"Sebagai fungsi anggaran yakni DPR bersama pemerintah memastikan alokasi anggaran untuk mendukung industri digitalisasi di Indonesia. Contohnya menyetujui anggaran pembangunan infrastruktur koneksi jaringan internet di seluruh pelosok daerah", tambahnya.

Kemudian sebagai fungsi pengawasan, Toriq mengungkapkan DPR harus memastikan payung hukum dan anggaran alokasi untuk perkembangan industri digitalisasi Indonesia dapat direaslisasikan pada tataran pelaksanaan dan sesuai dengan target yang diinginkan.

Kemudian Toriq memberikan Apresiasi kepada Bakti-Kominfo yang menyelenggarakan kegiatan seminar ini, karena program ini memberikan akses mentoring dan net working kepada peserta seminar yang sebagian besar konstituennya, sekaligus dirasakan secara langsung kemanfaatannya.

"Saya berharap kepada Kominfo agar memperbanyak program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di dapil 11 ini. Baik dari bentuk program maupun jumlah", harapnya.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Sebagai fungsi anggaran yakni DPR bersama pemerintah memastikan alokasi anggaran untuk mendukung industri digitalisasi di Indonesia. Contohnya menyetujui anggaran pembangunan infrastruktur koneksi jaringan internet di seluruh pelosok daerah"

Dorong Potensi Petani Sukabumi, Aleg PKS Fasilitasi Pelatihan

KUTIPAN

Informasi yang dihimpun, pelatihan juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui zoom meeting.

Sukabumi (12/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), drh Slamet mendorong petani dan penyuluh pertanian di Sukabumi, Jawa Barat untuk lebih meningkatkan kapasitasnya.

Hal itu dibuktikan lewat pelatihan dengan mengumpulkan 50 petani pembuat pupuk organik dan penyuluh pertanian pada Kamis (11/2/2021) di Agro Wisata Ponpes Mabda Islam Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.

"Sebagai wakil rakyat saya berkomiten untuk berupaya seoptimal mungkin memajukan sektor pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi," kata Slamet.

Informasi yang dihimpun, pelatihan juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui zoom meeting.

"Semoga semua bantuan yang sudah disalurkan membawa manfaat dan kemajuan untuk para petani," pungkas Slamet.

drh. H. SLAMET
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

“Sebagai wakil rakyat saya berkomiten untuk berupaya seoptimal mungkin memajukan sektor pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi, Semoga semua bantuan yang sudah disalurkan membawa manfaat dan kemajuan untuk para petani”

Tinjau Banjir Indramayu, Netty Minta Pemerintah Jangan 'Hit n Run' dalam Penanganan Bencana

KUTIPAN

Indramayu (11/02) --- Sejak 8 Februari, tercatat 22 kecamatan di Kabupaten Indramayu terdampak banjir. Lebih dari 25.000 unit rumah terendam dan 77.000 warga mengungsi.

Legislator Dapil Jabar VIII, Kokab Cirebon - Indramayu, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memikirkan terobosan penanganan bencana yang terintegrasi dari hulu ke hilir, solutif dan preventif, serta jangan hit n run, katanya dalam keterangan media, Kamis, (11/02).

"Banyak wilayah di Indonesia rawan banjir akibat kerusakan lingkungan, pendangkalan sungai dan pembangunan dengan amdal asal-asalan. Negara tidak bisa membiarkan banjir seolah menjadi langganan masyarakat karena tidak ada langkah penanganan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, solutif, permanen dan preventif. Pemerintah dengan kewenangan anggaran dan eksekusi seharusnya mampu mencari terobosan out of the box," katanya.

Netty juga meminta Pemerintah agar tidak melakukan penanganan banjir dengan pola 'hit n run', yaitu di saat banjir, datang menyapa rakyat dengan bantuan ala kadarnya, setelah surut, langkah antisipatif lambat dieksekusi atau kurang efektif.

"Melindungi rakyat dari bencana adalah tugas pemerintah. Optimalkan anggaran dan kewenangan yang diberikan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut. Mulai dari mengintegrasikan penanganan banjir dengan membuang ego sektoral dan ego wilayah. Saat kejadian, beri dukungan maksimal pada masyarakat terdampak, dan yang terpenting adalah mencari terobosan solusi permanen," katanya.

Netty meninjau lokasi banjir di Kecamatan Kandanghaur, menyapa masyarakat serta menyerahkan bantuan berupa perahu karet, obat-obatan, makanan matang, juga kebutuhan khas perempuan dan anak seperti pampers, pakaian dalam, selimut melalui Posko Penanganan Banjir DPD PKS Kab Indramayu.

Anggota Komisi IX DPR ini memberikan semangat pada masyarakat yang mengungsi di posko.

" Bapak ibu harus tetap menjaga kesehatan di tengah situasi banjir. Hubungi relawan dan petugas kesehatan jika ada keluhan agar segera mendapat penanganan. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan bersabar dalam musibah. Saya akan meminta pemerintah memberi dukungan yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Ketua DPD PKS Indramayu, Ruswa mengapresiasi bantuan yang diberikan Netty dan berjanji menyalurkannya pada masyarakat.

"Dengan dukungan yang diberikan, relawan PKS akan lebih mudah memberikan pelayanan pada masyarakat, baik pada masa darurat bencana, maupun masa recovery nanti. PKS melakukan pelayanan karena peduli pada masyarakat, adapun spanduk, foto dan pemberitaan hanyalah bukti pertanggungjawaban kami pada mereka yang telah menitipkan bantuan melalui Posko PKS," ujar Anggota DPRD Kab Indramayu ini.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

> "Negara tidak bisa membiarkan banjir seolah menjadi langganan masyarakat karena tidak ada langkah penanganan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, solutif, permanen dan preventif. Pemerintah dengan kewenangan anggaran dan eksekusi seharusnya mampu mencari terobosan out of the box"

You Stay At Home,
We Stay At Parliament
DPR - RI
PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Masa Reses, Nevi Zuairina Bertemu Pengusaha dan Dukung Pengembangan Jiwa Wirausaha Berbasis Nagari

KUTIPAN

Kota Pariaman (19/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, saat reses DPR RI masa sidang III Tahun sidang 2020 - 2021 mulai merealisasikan program Pengembangan UMKM di daerah pemilihannya.

Kali ini, Nevi mendukung penumbuhan jiwa wirausaha berbasis nagari yang dimulai dari Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

"Salah satu hal yang nyata dapat dilakukan di lapangan adalah membantu masyarkat membangun jiwa wirausaha. Wirausaha ini untuk dapat mencapai pemerataan di tiap lokasi harus berbasis nagari. Dengan meratanya jiwa wira usaha hingga sampai pelosok-pelosok, diharapkan pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan hingga kabupaten terus progresif naik", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mencontohkan wirausaha yang relatif dapat dilakukan secara sederhana menjual paket makanan berupa nasi dan ayam goreng.

Sebagai simulasi, Nevi menggambarkan, setiap titik usaha, keuntungan per 1 ekor ayam sebesar 20 ribu rupiah. Bila para usahawan dapat menjual sendiri sebanyal 5 ekor (sekitar 45 potong), maka dapat keuntungan 100 ribu rupiah.

"Kebutuhan akan makanan ini akan banyak diminati karena setiap hari, permintaan makanan akan selalu ada. Mudah-mudahan dengan seriusnya para usahawan, seperti contoh menjual paket ayam goreng dan nasi dengan volume sekitar 12 ekor ayam per hari, maka mereka dapat menyimpan penghasilan sekitar 250 ribu rupiah per hari", ungkap Nevi.

Politisi PKS ini mengaku akan terus berupaya mengembangkan potensi-potensi daerah yang berbasis nagari. Setiap daerah memiliki kekhasan yang berbeda dan sumber daya yang berbeda pula. Dengan skala kecil tapi masif tiap daerah, maka perekonomian akan bergeliat masif hingga kabupaten bahkan provinsi.

"Mudah-mudahan, dengan makin meningkatnya perekonomian di tiap nagari, akan memberikan kontribusi Sumatera Barat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional", tutup Nevi Zuairina.

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Salah satu hal yang nyata dapat dilakukan di lapangan adalah membantu masyarkat membangun jiwa wirausaha. Wirausaha ini untuk dapat mencapai pemerataan di tiap lokasi harus berbasis nagari. Dengan meratanya jiwa wira usaha hingga sampai pelosok-pelosok, diharapkan pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan hingga kabupaten terus progresif naik"

Kunjungi DPC PKS Cilodong, Nur Azizah: Kader PKS Harus Sukseskan Depok Jadi Kota Layak Anak

KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A. ajak semua unsur kader PKS untuk turun tangan sukseskan Depok agar segera mendapat predikat Kota Layak Anak.

"Saat ini Depok telah menyandang status Nindya, yang artinya harus melewati dua peringkat lagi untuk mencapai Kota Layak Anak". Hal tersebut disampaikan Nur Azizah dalam agenda Kunjungan Daerah Pemillihan (Kundapil) Masa Persidangan Ke-3 Tahun 2020-2021 Anggota DPR RI pada Ahad (7/2) di Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Depok.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, drg. Nessi Annisa H, Kabid Pengembangan dan Tumbuh Kembang Anak, Yulia Oktavia, Ketua DPC PKS Cilodong, Suparjiyo, BPH DPC Cilodong, Perwakilan DPRa PKS, serta anggota SPKK dan UPKK se Kecamatan Cilodong.

"Saat ini terdapat 247 dari 514 kota dan kabupaten di Indonesia yang berproses menuju kabupaten dan kota layak anak berdasarkan peringkatnya, atau sebanyak 48% yang menempati predikat Pratama, Madya, Nindya dan Utama, dan Depok ada di predikat Nindya", jelas Nur Azizah.

Menurut Nur Azizah predikat yang saat ini disandang Kota Depok harus dapat memicu seluruh lapisan masyarakat agar dalam waktu yang singkat segera naik ke peringkat Utama, selanjutnya ke peringkat tertinggi yakni Depok Kota Layak Anak. "Tentu hal ini juga merupakan pekerjaan kita bersama, seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali para kader PKS untuk terus menggerakan masyarakat, dan di tingkat terkecil dengan menghidupkan RW yang ramah anak. Karena itu saya mengajak SPKK dan UPKK yang hadir di sini agar dapat memahami terkait RW ramah anak ini sehingga dapat berkontribusi secara oprtimal bersama masyarakat." ungkap Nur Azizah.

Sementara itu menurut Kepala DPAPMK, drg. Nessi, pelaksanaan RW ramah anak di Depok saat ini belum berjalan dengan baik, harus ada sinergi yang baik dari seluruh unsur masyarakat. "Saat ini, RW ramah anak fungsinya masih belum berjalan secara maksimal. RW ramah anak ini adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kota dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak-anak, terutama anak-anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, serta penelantaran dan tindak kekerasan", jelas Nessi.

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Predikat yang saat ini disandang Kota Depok harus dapat memicu seluruh lapisan masyarakat agar dalam waktu yang singkat segera naik ke peringkat Utama, selanjutnya ke peringkat tertinggi yakni Depok Kota Layak Anak"

Nessi berharap di kepemimpinan Depok yang baru ini, pemerintah dapat bersama-sama membangun kesadaran seluruh unsur masyarakat untuk menghidupkan RW ramah anak di Depok. "Jadi RW ramah anak ini Ketika sudah difungsikan secara maksimal, saya berharap bapak ibu juga nanti bisa membantu kami di dalam penguatan RW ramah anak", imbuh Nessi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hadiri Peresmian ATM Beras, Nurhasan Zaidi: Semoga Bermanfaat bagi Masyarakat

KUTIPAN

Majalengka (18/02) –– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi bersama Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bupati Majalengka menghadiri acara Peresmian Program Kemaslahatan BPKH berupa pemasangan Instalasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Beras di Masjid Pusaka Perguruan Darul Uluum PUI Majalengka, Kamis (18/02).

Dalam sambutannya Nurhasan Zaidi mengungkapkan Apresiasi atas terealisirnya program ATM Beras perdana di Majalengka ini.

"Saya atas nama Anggota DPR RI Komisi VIII sekligus Ketua Umum DPP PUI memberikan Apresiasi kepada BPKH dan Rumah Zakat. Ini sebuah kerja besar, sinergitas yang positif, Insyaallah semoga dapat bermanfaat dan dan memberikan maslahat bagi masyarakat", ujarnya.

Nurhasan juga mengungkapkan harapannya agar BPKH terus konsisten bekerja dengan profesionalismenya menjaga amanah pengelolaan dana haji umat dan mengoptimalkan nilai manfaat pengelolaan dana tersebut untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat.

Sementara itu, Ketua BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan bahwa ATM Beras ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memakmurkan masyarakat yang berbasis masjid dimana kemanfaatannya bisa memberikan akses kebutuhan pangan untuk 200 penerima manfaat atau sekitar 50 KK.

"Alhamdulillah hari ini kita mendapat inspirasi dan bisa kita realisasikan, yakini untuk pertama kalinya BPKH membuat program penguatan ekonomi ummat melalui ATM Beras. Terimakasih kepada Perguruan Darul Uluum PUI yang bersedia bersinergi dan Rumah Zakat yang telah menginisiasi pembuatan ATM Beras berbasis masjid pertama di Majalengka", ungkapnya.

"Dengan pemilihan lokasi di Masjid Pusaka Darul Umum PUI ini, dengan satu investasi kita mendapatkan dua manfaat sekaligus, manfaat sosial ekonomi dan syiar spiritual. Mudah mudahan ini bisa ditularkan ditempat lain" lanjutnya.

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

"Alhamdulillah hari ini kita mendapat inspirasi dan bisa kita realisasikan, yakini untuk pertama kalinya BPKH membuat program penguatan ekonomi ummat melalui ATM Beras.

PKS

BIO GRAFIS

Yuk Kenali Aleg Kamu

CHAIRUL ANWAR

Profil

- Nama Lengkap
  Drs. Chairul Anwar, Apt.
- Tempat, Tanggal Lahir
  Pekanbaru , 13 Oktober 1963
- Dapil
  Riau I (Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kep. Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai)

Keluarga

- Istri : **Meriawati, Apt**
- Anak : **7 Orang**
  Cucu : **4 Orang**

Pendidikan

- **SMAN 12 Jakarta**
  1979 – 1982
- **S1 Farmasi, FMIPA Univ. Indonesia**
  1982 – 1989
- **S2 Profesi Farmasi, Univ. Indonesia**
  1989 – 1991

Riwayat Organisasi

- **Ikatan Alumni Univeritas Indonesia (ILUNI UI) Fakultas Farmasi -** Ketua Umum, 2018
- **Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) -** Sebagai : Wakil Ketua Umum, 2018
- **Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS,** Sebagai: Ketua DPP, 2015 – 2020
- **Wilayah Dakwah Sumatera DPP PKS,** Sebagai: Ketua DPP, 2005 – 2010
- **Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara DPP PKS,** Sebagai: Ketua DPP, 2000 – 2005

Riwayat Pekerjaan

- **DPR-RI : Anggota Komisi IX,** 2004 – 2011
- **DPR-RI : Anggota Komisi V dan Badan Legislasi,** 2011 – 2016
- **DPR-RI : Anggota Komisi II dan Badan Anggaran,** 2016 – 2019
- **DPR-RI : Anggota Komisi VI dan Badan Anggaran,** 2019 – 2020
- **DPR-RI : Anggota Komisi II dan Badan Anggaran,** 2021 – sekarang

Media Sosial

: Chairul Anwar
: @chairul.anwar.pks

Desain : Aditya Angga

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Masa Reses, Mahfudz Kunjungi dan Berikan Bantuan di Kota Bekasi

KUTIPAN

Bekasi (16/02) –– Anggota DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman mengunjungi sejumlah titik di Kota Bekasi, Selasa (16/02/2021).

Politisi Dapil 6 Jawa Barat yang juga petinggi PKS ini pun memberikan bantuan penanganan COVID-19 dan korban banjir.

Pada kesempatan ini Mahfudz Abdurrahman mengunjungi titik awal di Yayasan Masjid Daruttaubah dan lingkungan Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara.

Mahfudz Abdurrahman menyampaikan bahwa kegiatan Reses ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Anggota Dewan, hal ini mengacu pada Undang-Undang.

"Saat ini masuk masa reses, di DPR tidak ada agenda-agenda rapat, maka reses dilakukan agar Anggota Dewan bisa lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Sebenarnya hal ini (reses) merupakan agenda wajib Anggota Dewan manapun" ucapnya.

Hanya saja menurut Mahfudz Abdurrahman reses saat ini berbeda seperti kondisi sebelumnya, wabah Corona yang melanda merubah semuanya.

Reses yang jumlahnya terbatas juga senantiasa harus menerapkan protap kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan hal ini bagian dari ikhtiar kita melindungi diri dari wabah virus COVID-19.

"Reses sekarang karena di masa pandemi COVID-19, jadi semua dibatasi, mulai tidak mengumpulkan banyak orang, dan tentunya juga wajib menerapkan protap kesehatan yang sudah ditentukan" sambungya.

Selanjutnya Mahfudz Abdurrahman berdialog mengenai kondisi yang di alami bangsa saat ini dan berdampak hingga ke masyarakat bawah. Mulai dari wabah COVID-19 hingga musibah banjir yang saat ini menimpa negeri Indonesia.

Mahfudz Abdurrahman turut prihatin dan berempati terhadap masyarakat yang terdampak musibah yang tengah melanda negeri.

"Saya turut prihatin dan berempati atas musibah yang terjadi saat ini dan berdampak pada masyarakat bawah, semoga musibah ini cepat berlalu dan semuanya kembali pada kehidupan normal" katanya.

Pada kesempatan reses ini tak lupa Mahfudz Abdurrahman memberikan bantuan dana untuk pihak Yayasan Masjid Daruttaubah yang memang di dalamnya menampung dan membina banyak anak yatim piatu dan dhu'afa dari wilayah di Indonesia yang juga terdampak wabah COVID-19.

Salah satu tokoh masyarakat yang juga Ketua Umum Yayasan Masjid Daruttaubah, Djoni, sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan silaturrahim

Mahfudz juga bantuan yang diberikannya. Karena itu sangat membantu dan mengurangi beban lembaga yang kami pimpin.

"Saya selaku Ketua Umum yayasan beserta jajaran sangat mengapresiasi dan berterima kasih yang sedalam-dalamnya atas kunjungan Pak Mahfudz Abdurrahman beserta tim yang memang tidak melupakan kami sejak masa kampanye, semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan Pak Mahfudz untuk lembaga kami dengan pahala yang berlipat ganda" tuturnya.

Kemudian Mahfudz melanjutkan kunjungannya ke sejumlah wilayah titik banjir di Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara dan menyempatkan bersilaturrahim ke Yayasan Aslama Diaul Haq yang berlokasi tak jauh dari titik banjir.

H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

> Saat ini masuk masa reses, di DPR tidak ada agenda-agenda rapat, maka reses dilakukan agar Anggota Dewan bisa lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Sebenarnya hal ini (reses) merupakan agenda wajib Anggota Dewan manapun"

Aleg PKS Dorong Majukan Bandara Arung Palaka untuk Pikat Investor

KUTIPAN

Kabupaten Bone (16/02) --- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mendorong kemajuan Bandara Arung Palaka sebagai salah satu sebab datangnya investor untuk membangun Kabupaten Bone.

Dengan bergeliatnya Bandara Arung Palaka, kedepannya masyarakat dari jauh akan semakin mudah menuju maupun keluar dari Bone untuk berbagai keperluan.

"Salah satu contoh Bandara yang dihidupkan dengan marak adalah Bandara Blimbingsari di Banyuwangi. Seiring semakin maraknya jadwal penerbangan di bandara ini, kini bandara ini sudah menjadi Bandar Udara Internasional Banyuwangi yang membawa kabupaten ini semakin maju baik dari pariwisata maupun infrastrukturnya. Bukan tidak mungkin, Kabupaten Bone menjadi tempat yang maju pariwisatanya maupun infrastrukturnya lebih dari yang sekarang akibat bandara udara yang semakin baik pengelolaannya", tutur Akmal.

Legislator PKS ini mengatakan, dengan menggeliatnya Bandara Arung Palakka, maka akses investor menjajaki peluang investasi di Bone, kian terbuka.

Akmal menjelaskan, bahwa Potensi pengembangan Kabupaten Bone sangat besar. Potensi Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Perikanan, perkebunan, dan masih banyak lagi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bone. Peningkatan skala dari saat ini dapat dilipatgandakan yang berujung pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

"Kalau akses lewat darat, cukup lama ditempuh oleh investor. Jadi investor tentu berpikir masuk ke Bone. Tetapi kalau Bandara aktif, waktu akses lebih cepat dan ini juga menjadi pintu besar bagi wisatawan masuk Bone," jelas Andi Akmal Pasluddin.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menyebutkan, akses darat, laut, dan udara di daerah berjuluk Bumi Arung Palakka merupakan salah satu nilai jual bagi Bone.

Setiap daerah di Bone, lanjut Akmal, dapat dikembangkan lebih berkualitas dengan melibatkan masyarakat Bone. Tapi tentunya ada momentum besar yang dapat menggugah para investor untuk membangun Bone sebagai langkah awalnya.

"Perhatikan akses transportasi, juga sarana dan prasarana pendukung lainnya. Ini yang menjadi kunci agar orang luar tertarik mau ke Bone," pungkasnya.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Potensi pengembangan Kabupaten Bone sangat besar. Potensi Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Perikanan, perkebunan, dan masih banyak lagi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bone. Peningkatan skala dari saat ini dapat dilipatgandakan yang berujung pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Hadiri Silaturahmi Genpro, Rofik: Perlu Gebrakan agar Lintas Generasi Paham Ide Besarnya

KUTIPAN

Purbalingga (19/02) --- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rofik Hananto hadir dalam acara silaturahmi bersama komunitas pengusaha profesional (Genpro) Pusat pada Kamis (18/02/2021) di Aula Rumah Berdaya Purbalingga, Jawa Tengah.

Dalam acara silaturahmi ini, diisi juga dengan diskusi mengambil tema Optimalisasi Peran Struktur, Anggota Dewan dan Kepala Daerah dalam Pemberdayaan UMKM.

Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Pengurus Genpro Pusat, Ketua BPJE DPW PKS Jawa Tengah Agung Budi Margono, pengurus DPD dan Anggota DPRD fraksi PKS dari Purbalingga dan sekitarnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Rofik yang juga merupakan Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) DPP PKS menilai perlu adanya gebrakan agar bagaimana lintas generasi mengetahui ide-ide besar Genpro.

"Dibutuhkan sebuah gebrakan bagaimana lintas generasi, minimal mendengar dan tahu ide-ide besar GENPRO ini. Masalah nanti bisa diimplementasi semua atau ada deviasi-deviasi itu masalah lain," kata Rofik

"Saya sangat mengapresiasi acara ini karena memang untuk meyakinkan sebuah ide wacana kepada sesuatu yang sekarang menjadi resources partai yang sangat besar bukan perkara mudah. Ada 1.200 anggota DPRD kabupaten/kota, 210 anggota DPRD provinsi dan 50 anggota DPR RI," kata Rofik.

Rofik menambahkan hari ini Genpro dengan pendekatan yang proaktif berkeliling kemana-mana menyampaikan sebuah model baru kepada para legislatif dan eksekutif dalam rangka mengoptimalisasi kepemimpinan mereka dan peluang yang mereka miliki.

Dan peluang ini bisa menjadi sarana yang sangat baik untuk pemberdayaan masyarakat. Karena itu Rofik berharap acara hari itu tidak menjadi pertemuan terakhir tetapi ditindaklanjuti peserta dalam bentuk yang kongkrit.

"Apa yang menjadi harapan kita bersama, anggota Dewan yang optimal dan produktif yang benar-benar bisa menunaikan tugas-tugasnya dan memberikan harapan yang baik kepada masyarakat dengan aspirasinya, bisa kita wujudkan bersama-sama," harap anggota FPKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII ini.

Presiden Genpro Iwan Kurniawan mengatakan, momentum-momentum terbaik banga ini selalu ada hubungannya dengan isu-isu perdagangan. Sehingga sektor pemberdayaan ekonomi layak untuk diperjuangkan.

"Pemberdayaan ekonomi bisa menambah perolehan suara, bisa menjadi tulang punggung finansial gerakan. Jika PKS diberi amanah menguasai suatu daerah maka seharusnya PKS mempunyai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat," katanya.

"PKS mempunyai soliditas struktur, aleg, kepala daerah, maka sektor pemberdayaan UMKM harus ditingkatkan sehingga PKS bisa menyapa masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal PKS," Tambahnya.

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

> "Dibutuhkan sebuah gebrakan bagaimana lintas generasi, minimal mendengar dan tahu ide-ide besar GENPRO ini. Masalah nanti bisa diimplementasi semua atau ada deviasi-deviasi itu masalah lain"

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Turut
Berduka
Cita

Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Hj. Ellyda binti Muhammad Yatim

Ibunda Bapak Dr. Fadli Zon

Pada Jumat, 19 Februari 2021 pukul 11:55 WIB
di Rumah Sakit Universitas Indonesia
(RSUI) Depok pada usia 75 tahun.

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta
menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya
Amin

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Kunjungi Lokasi Banjir, Anis Apresiasi Kerja Aparat yang Sigap Tangani Banjir

KUTIPAN

Jakarta (19/02) --- Banjir kembali menggenangi beberapa daerah di Jakarta pada Jum'at (19/02/2021).

Hal ini sebagaimana prediksi BMKG sehari sebelumnya yang mengatakan akan terjadinya cuaca ekstrim di Jabodetabek pada 19-20 Februari dan meng-akibatkan banjir di Jakarta.

Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, langsung meninjau lokasi banjir Jumat pagi.

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini menyambangi korban banjir di wilayah Cipinang Bali, tepatnya di Rw.013 Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Di wilayah ini terdapat 3 Rw yang terdampak banjir dengan ketinggian sampai pinggang orang dewasa (+- 1 meter), yaitu Rw 06, Rw 07 dan Rw 12.

Saat mengunjungi lokasi, beberapa rumah warga di pinggiran Kali Sunter masih nampak terendam air. Nampak juga para petugas yang tengah melakukan evakuasi korban banjir. Berdasarkan informasi dari aparat setempat, terdapat sekitar 200 KK terdampak banjir pada hari ini.

Selain mengunjungi lokasi pemukiman warga dan posko pengungsian korban banjir, Anis juga mengunjungi Posko Kesehatan yang terletak di Rw.013 Cipinang Muara.

Setelah berbincang dengan beberapa petugas dan masyarakat yang berada disana, Anis menilai kerja aparat dalam penanganan banjir ini cukup bagus.

"Saya melihat pihak Camat, Lurah, RW dan RT di wilayah Cipinang Muara ini cukup sigap dan cepat dalam penanganan korban banjir di wilayahnya," kata Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga bertemu dengan Wakil Camat Jatinegara beserta jajarannya, Lurah Cipinang Muara, serta ketua RW dan RT setempat yang bersama-sama dengan Anis meninjau lokasi banjir.

Anis sendiri didampingi oleh Ketua BPKK DPD PKS Jakarta Timur, jajaran Pengurus DPC PKS Kecamatan Jatinegara serta para kader yang turut serta berjalan ke lokasi bersama Anis.

Sebagai tanda kasih untuk membantu para korban banjir, Anis menyampaikan sejumlah bantuan dana melalui Ketua RT setempat.

Dalam dialognya bersama masyarakat, Anis menyampai-kan rasa empatinya dan secara simbolis memberikan bantuan masker kepada warga setempat.

Anis menyatakan dirinya sangat memberikan apresiasi kepada seluruh aparat dan komponen masyarakat yang bahu membahu secara kompak bergerak mengatasi bencana banjir.

"Semoga banjir segera surut, dan warga yang terdampak bisa kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat," tuturnya menutup dialog dengan warga.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Saya melihat pihak Camat, Lurah, RW dan RT di wilayah Cipinang Muara ini cukup sigap dan cepat dalam penanganan korban banjir di wilayahnya. "Semoga banjir segera surut, dan warga yang terdampak bisa kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat"

HNW Terima Masukan RUU Penanggulangan Bencana dari WNI di Jepang

KUTIPAN

Jakarta (15/02) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima berbagai masukan dari PKS Jepang dan Ahli Kebencanaan terkait pembahasan RUU Penanggulangan Bencana.

Masukan yang diterima di antaranya soal skema strategi penanggulangan bencana lokal dan nasional di Jepang, usulan perubahan pasal dalam RUU Penanggulangan Bencana, dan dorongan untuk memasukkan kewajiban perlindungan sosial pascabencana.

"Saran-saran yang disampaikan sangat bagus, saya akan dorong agar masuk draf RUU Penanggulangan Bencana yang sedang dibahas di Komisi VIII DPR-RI," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (15/02).

Hal itu diungkapkannya dalam acara Serap Aspirasi dengan PIP PKS Jepang, Minggu (14/2) kemarin. Anggota Komisi VIII DPR-RI yang salah satunya membidangi urusan bencana ini menyebutkan setidaknya ada 4 masukan utama terkait urusan penanggulangan bencana.

Pertama, kajian PKS Jepang menunjukkan bahwa Jepang sebagai negara yang berpotensi terkena banyak bencana memiliki tiga skema Undang-Undang, yakni UU Pokok Penanggulangan Bencana yang diturunkan menjadi Rencana Penanggulangan Bencana dari tingkat nasional hingga tingkat kota/desa. Undang-Undang Bencana Tertentu (banjir, longsor, sungai, gempa, tsunami, gunung berapi, nuklir), dan UU Gempa tertentu (gempa besar, gempa di bawah Tokyo).

Kehadiran UU Bencana tertentu dan UU Gempa tertentu mengindikasikan keseriusan Pemerintah Jepang untuk merumuskan langkah detail dan spesifik untuk setiap bencana, sebagai komplemen terhadap langkah dan gambaran besar yang tertuang dalam UU Pokok Penanggulangan Bencana.

Kedua, kajian yang sama mengusulkan agar Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) dalam RUU Penanggulangan Bencana mempertegas kewajiban meninjau dan memperbarui Rencana Penanggulangan Bencana, dari yang sebelumnya berkala menjadi terukur secara spesifik, misalnya setiap tahun.

Dalam UU Pokok Penanggulangan Bencana Jepang, Pemerintah wajib meninjau dan melaporkan rencana dasar penanggulangan bencana setiap tahun kepada Parlemen. Hal ini agar dokumen perencanaan dan penanggulangan bencana tidak ketinggalan zaman dan selalu bisa dipertanggungjawabkan oleh pengambil kebijakan.

HNW yang juga Anggota DPR-RI Dapil Jakarta II juga mencatat masukan ketiga terkait kejadian kebakaran yang belum masuk sebagai kategori bencana. Padahal, di dalam kota khususnya, kebakaran dengan cepat merusak banyak bangunan dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Namun para korban tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak ada nomenklatur kebakaran dalam Penanggulangan Bencana.

Keempat, ahli Bencana Alfi Rahman menuturkan bahwa mekanisme penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya berhenti pada saat bencana terjadi, tetapi harus terus dilanjutkan hingga pascabencana. Sebab masyarakat di lokasi terdampak bencana membutuhkan waktu pemulihan yang sering kali lebih lama dari waktu terjadinya bencana.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Saran-saran yang disampaikan sangat bagus, saya akan dorong agar masuk draf RUU Penanggulangan Bencana yang sedang dibahas di Komisi VIII DPR-RI,"

Kunjungi Kanal Resmi Fraksi PKS DPR RI

- Website fraksi.pks.id
- Instagram fraksipksdprri
- Twitter @fraksipksdprri
- Facebook Fraksi PKS DPR RI
- Youtube PKSTV DPR RI

Nantikan Setiap Pekan